

Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan
ini menjabarkan, meniadakan, hindarkan
Hal yang merugikan ~~perjuangan~~
dan keberanian d. l. l., ~~dianggap~~
dengan, harus, saksama dan, dalam
tempoh yang singkat - singkat
nya.

Djakarta, 17-8-'45
Wakil² bangsa Indon

Sejarah

**Museum Perumusan
Naskah Proklamasi**

Dicetak Ulang :
Museum Perumusan Naskah Proklamasi
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
2011

SAMBUTAN DIREKTUR PERMUSEUMAN

Salah satu media penyebarluasan informasi adalah melalui media cetak berupa buku, brosur, leaflet dan sebagainya. Dalam kesempatan ini Museum Perumusan Naskah Proklamasi menerbitkan kembali buku “Sejarah Museum Perumusan Naskah Proklamasi”, dalam rangka memenuhi permintaan pengunjung museum yang ingin lebih banyak mengetahui tentang sejarah lahirnya Naskah Proklamasi.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah sebuah Museum Khusus yang memberi gambaran secara obyektif kepada masyarakat khususnya generasi penerus bangsa mengenai lahirnya Naskah Proklamasi yang dibacakan oleh Proklamator Ir. Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945.

Lahirnya Naskah Proklamasi masih kurang banyak dikenal oleh masyarakat. Almarhum Prof.Dr. Nugroho Notosusanto selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu menghendaki gedung yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.1, yang dulu bernama Jalan Meiji Dori I dan pada tahun 1945 dipergunakan sebagai tempat kediaman Laksamana Muda Laut Tadashi Maeda, sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi, karena di tempat inilah Naskah Proklamasi dirumuskan.

Dengan berubahnya struktur organisasi bidang kebudayaan yang berpindah dari Departemen Pendidikan Nasional ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Surat Keputusan SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.50/OT.001/MKP/2003 serta kemudian berubah menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Keputusan Menteri No. PM.36/OT.001/MKP.2006, Museum Perumusan Naskah Proklamasi masih tetap menjadi unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Museum, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.

Melalui penerbitan buku Sejarah Museum Perumusan Naskah Proklamasi diharapkan masyarakat akan mengetahui bahwa dari Gedung Jl. Imam Bonjol No 1 itulah dimulai proses kemerdekaan bangsa Indonesia.

Walaupun masih banyak kekurangan, mudah-mudahan buku ini dapat menambah khasanah pengetahuan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia.

Jakarta, November 2011

Direktur Permuseuman

Dra. Intan Mardiana, M. Hum

NIP. 195704061984112001

KATA PENGANTAR

Perjalanan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan tidak terlepas dari peranan gedung yang berada di Jl. Imam Bonjol No.1 . Di gedung inilah pada tanggal 16 Agustus 1945 para pemimpin bangsa berkumpul untuk merumuskan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Ir. Soekarno sebagai pernyataan bahwa Indonesia telah merdeka, lepas dari belenggu penjajahan. Sebagai gedung yang bersejarah dalam perjalanan menuju kemerdekaan bangsa Indonesia, maka pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0476/0/1992 tanggal 24 Nopember 1992 menetapkan gedung ini sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai museum sejarah mencoba untuk memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai peran yang terjadi di gedung tersebut melalui media cetak dalam bentuk buku Sejarah Museum Perumusan Naskah Proklamasi, sebagai media informasi kepada pengunjung museum khususnya bagi para pelajar. Mengingat penerbitan pertama sudah habis sementara minat masyarakat kunjung museum meningkat, maka kami mencetak ulang buku Sejarah Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Semoga dengan adanya cetak ulang buku ini dapat memenuhi kebutuhan pengunjung akan data atau informasi mengenai sejarah Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Jakarta, November 2011

Kepala Museum

Dra. Huriyati, M.M

NIP. 196305291991032001

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR PERMUSEUMAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
BAB II : SELINTAS SEJARAH MENUJU PROKLAMASI	
KEMERDEKAAN.....	7
A. Pola Politik Jepang Terhadap Indonesia.....	7
B. Janji Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari.....	25
C. Peranan Golongan Pemuda Dalam Menuju Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.....	34
BAB III : SEKITAR PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI.....	38
A. Peristiwa Menjelang Proklamasi.....	38
B. Proses Perumusan Naskah Proklamasi.....	46
C. Hubungan Museum Perumusan Naskah Proklamasi dengan Museum Lain.....	60
BAB IV : MENINJAU MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI DARI DEKAT.....	63
A. Sejarah Bangunan.....	63
B. Keadaan Bangunan.....	65
C. Ruang Bersejarah.....	67
1. Ruang Penerimaan.....	69
2. Ruang Perumusan Naskah Proklamasi.....	70
3. Ruang Pengetikan.....	71
4. Ruang Penandatanganan/Pengesahan Naskah Proklamasi.....	71
BAB V : PENUTUP.....	73
DAFTAR SUMBER.....	75

BAB I

PENDAHULAN

Pada dasarnya sejarah adalah rangkaian perjuangan umat manusia dalam rangka perjuangan mempertahankan eksistensinya, dan untuk mencapai cita-citanya. Demikian pula halnya dengan perjuangan bangsa Indonesia. Sejak “Bangsa Indonesia” mulai ada, sejak itu pula perjuangan Bangsa telah ada. Hal ini berarti pada waktu berdirinya kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram, Aceh, Makasar, dan sebagainya, perjuangan “Bangsa Indonesia” telah berlangsung. Sejak munculnya Bangsa “Barat” di Indonesia, terutama sejak berhasilnya kolonialisme Belanda menanamkan kekuasaannya, perjuangan bangsa Indonesia terutama ditujukan untuk mengusir kaum penjajah.

Akibat penjajahan, menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Selain itu timbul pula perubahan sosial, yang akhirnya menciptakan kondisi-kondisi yang penuh kecenderungan bagi rakyat untuk mengadakan perlawanan.

Seorang ahli sejarah Inggris Arnold Toynbee mengemukakan hasil penelitiannya, bahwa apabila dua peradaban bertemu, dan penemuan itu ternyata mengakibatkan adanya penjajah dan yang dijajah, maka biasanya hal itu akan menimbulkan suatu reaksi atau perlawanan. Cara mereka melakukan perlawanan terhadap penjajah itu ada dua macam.

Pertama, dengan sikap seolah-olah negatif dan pasif. Mereka menjauhi penjajah, menolak pengaruhnya, dan selalu menghindari perkenalan dengan kebudayaan, tehnik, organisasi, dan lain-lain yang dibawa oleh penjajah. Mereka seolah-olah mengasingkan diri dan menutup pintu rapat-rapat bagi pengaruh penjajah. Dalam keadaan isolasi itu mereka memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan serta dapat dibebaskan dari cengkeraman penindasan penjajah. Sikap atau aliran ini biasa dinamakan *Zelotisme*.

Kedua, sikap yang dinamakan *Herodianisme*, yaitu dengan membuka pintu lebar-lebar bagi pengaruh penjajah. Mereka meniru

dan mempelajari mengenai segala yang dibawa penjajah baik yang berhubungan dengan bidang ekonomi, politik, kebudayaan, organisasi maupun yang berhubungan dengan bidang persenjataan. Setelah mereka berhasil memperoleh berbagai pelajaran dari pihak penjajah itu, maka dengan pengetahuan yang telah diperoleh itu mereka berusaha melawan dan mengusir penjajah.

Perkembangan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, mengalami perkembangan semacam itu. Akan tetapi, terwujud dalam berbagai bentuk:

Pertama, perlawanan yang biasa disebut istilah protes sosial. Perlawanan semacam ini umumnya berlangsung tidak lama dan merupakan pergerakan lokal yang tidak ada koordinasi antara yang satu dengan yang lainnya. Organisasi, program serta taktiknya masih sangat sederhana. Dalam peristilahan kolonial, peristiwa-peristiwa itu digolongkan sebagai gangguan ketentraman, huru-hara, kerusuhan, atau gerakan rohani. Contoh terkenal dalam hal ini adalah pemberontakan Cilegon-Banten pada tahun 1888 dibawah pimpinan Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail; pemberontakan Cimareme-Garut tahun 1919 di bawah pimpinan Haji Hasan (*Sartono Kartodirdjo, 1967:15*).

Kedua, perlawanan bersenjata yang sifatnya lebih besar dan berlangsung lama bahkan bertahun-tahun, seperti Perang Paderi, Perang Diponegoro, Perang Aceh dan sebagainya.

Perlawanan menentang penjajah bentuk ketiga, adalah perlawanan dengan cara modern yaitu dengan mengadakan organisasi yang teratur, atau biasa disebut pergerakan nasional. Perbedaan dengan perlawanan terdahulu ialah, bahwa pergerakan nasional tidak dilakukan dengan bentuk mengangkat senjata melainkan dengan bentuk organisasi.

Sejarah pergerakan kemerdekaan Bangsa Indonesia, merupakan suatu sejarah yang berkesinambungan, maka kesinambungan sejarah itu harus diterima sebagai masalah dan sekaligus sebagai tanggung jawab secara sadar.

Dalam masa Kebangkitan Nasional, bangsa Indonesia menyadari perlunya persatuan untuk perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Atas dasar persatuan dan keinginan itulah pada tanggal 28 Oktober 1928, dicetuskan Sumpah Pemuda, yang merupakan unjuk rasa bangsa Indonesia dalam rangka perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Kelanjutan dari perjuangan bangsa Indonesia mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang telah membawa bangsa Indonesia merdeka berdaulat serta menuju tahapan baru untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan yang telah diproklamasikan.

Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi, terjadi di gedung bekas kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, yang pada waktu itu bernama jalan Meiji Dori No.1 Jakarta, dan kini menjadi Jalan Imam Bonjol No.1. Peristiwa ini merupakan salah satu rangkaian sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena peristiwa itu tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi.

Oleh karena peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi itu terjadi pada masa pendudukan Jepang, maka seyogyanya kitapun menghayati atau meneliti bagaimana suasana politik di zaman itu. Nasionalisme Indonesia sebagai alat propaganda dengan dukungan pihak Jepang, menderita pasang surut yang parah sampai adanya janji Jepang pada bulan September 1944, yaitu janji memberikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari.

Di masa pendudukan Jepang, perjuangan rakyat untuk mencapai kemerdekaan berlangsung secara *legal* dan *illegal*. Perekonomian perang yang dilaksanakan Jepang di Indonesia telah menyebabkan desa dan para petaninya juga bergolak. Di Indramayu dan Singaparna timbul pemberontakan, juga di kalangan PETA terjadi pemberontakan, seperti yang terjadi di Blitar.

Di lain pihak, pendudukan Jepang di Indonesia dapat dikatakan telah memperkuat pergerakan nasional, karena :

- (1) Keruntuhan Sekutu, secara psikologis telah menghancurkan mitos bahwa bangsa kulit putih lebih unggul dari kulit berwarna.
- (2) Terbukanya beberapa jabatan tinggi yang biasanya diduduki oleh Bangsa Belanda, secara psikologis telah membuka dan menumbuhkan harapan dan pengalaman kepada Bangsa Indonesia.
- (3) Terbukanya kesempatan bagi golongan muda untuk ikut serta dalam organisasi Militer dan Semi Militer, merupakan bantuan kekuatan nyata bagi pergerakan. Para pemimpin pergerakan sadar akan nilai kekuatan organisasi-organisasi itu dan berusaha agar jangan sampai menjadi alat Jepang semata.
- (4) Politik Jepang sejak kedatangannya telah mempertimbangkan akan bantuan golongan nasionalis yang telah dikecewakan Belanda. Tujuan Jepang semula, ialah agar mereka dapat dijadikan alat untuk memobilisasi rakyat demi kepentingan program perangnya. Namun kaum nasionalis telah memanfaatkan kebebasan legal yang dimiliki oleh organisasi yang dibentuk Jepang, untuk menyusun kekuatan nasional. Selain itu, kedudukan organisasi yang berorientasi agama Islam tumbuh menjadi kuat.

Tatkala janji memberikan kemerdekaan Indonesia diumumkan lebih dinyatakan, di samping pengumuman akan didirikannya "Dokuritsu Zyumbi Tyosakai" atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), maka sejak itu golongan nasionalis mengambil inisiatif, dengan mencari, membicarakan, serta merumuskan Piagam Jakarta dan Naskah Pembukaan Undang-undang Dasar. Akhirnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang semula adalah badan yang dibentuk Jepang, akan tetapi sejak Jepang jatuh, badan itu sifatnya berubah menjadi badan nasional karena tidak pernah dilantik Jepang dan anggotanyapun ditambah 6 orang. Sampai akhirnya, terjadi perbedaan pendapat antara golongan pemuda Revolusioner dengan generasi tua nasionalis di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta, sehingga terjadi peristiwa Rengasdengklok. Akhirnya terjadilah peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi, yang

merupakan sejarah awal berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, yang dilanjutkan dengan pembacaan Teks Proklamasi bangsa Indonesia oleh Ir. Soekarno dengan didampingi Drs. Moh. Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi merupakan mata rantai yang menyambung masa lampau dengan harapan-harapan masa datang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan salah satu saluran perkembangan nasional terutama dalam usaha pembinaan antar generasi Indonesia.

Sejarah pergerakan nasional maupun sejarah kemerdekaan, merupakan nilai luhur yang lahir dari kancah perjuangan bangsa. Generasi muda yang akan meneruskan perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah generasi muda yang tidak lagi mengalami pahit getirnya zaman penjajahan Belanda, tidak mengalami penderitaan zaman pendudukan Jepang, tidak mengalami perang kemerdekaan yang digetarkan oleh semboyan “Merdeka atau mati”, tidak pula mengalami pergumulan politik *internal* yang tidak kunjung selesai, sampai akhirnya lahir Orde Baru. Generasi muda yang meneruskan sejarah itu adalah generasi muda yang ketika datang di dunia ini hanya mengetahui Indonesia sudah merdeka, berdaulat dan sedang membangun. Perjuangan dan pengorbanan masa silam, memang terjadi di masa lampau.

Sejalan dengan tujuan untuk mempelajari dan menghayati proses sejarah tersebut, maka peristiwa tersebut perlu diabadikan dalam sebuah museum, Sebagaimana kita ketahui, bahwa museum dapat berperan sebagai sarana komunikasi antara generasi, sehingga kita bukan hanya mengetahui jalannya sejarah saja, tetapi juga memahami pengertian yang hakiki serta dapat mengambil manfaat dari padanya.

Salah satu museum Sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia, adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi, karena merupakan tempat terjadinya peristiwa sejarah awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena, peristiwa bersejarah itu berlangsung

dalam suasana yang mengandung unsur kerahasiaan maupun *urgensi* yang amat mendesak, maka perekaman peristiwa dengan gambar tidak terjadi. Dengan demikian, hasil pengumpulan data sejarah untuk divisualkan dalam bentuk museum masih belum memuaskan. Oleh karena itu, museum Perumusan Naskah Proklamasi ini diwujudkan tidak dapat tepat sebagai seperti waktu peristiwa terjadi. Akan tetapi, hanya dapat memberikan informasi bahwa di gedung jalan Imam Bonjol No.1, pernah terjadi peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia.

Di samping itu, di gedung jalan Imam Bonjol No.1 pernah berperan pula dalam periode bangsa Indonesia mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan.

BAB II

SELINTAS SEJARAH MENUJU PROKLAMASI KEMERDEKAAN

A. Pola Politik Jepang Terhadap Indonesia

Setelah tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang Pearl Harbour, Pangkalan Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik, Jepang mulai bergerak ke Indonesia yang diharapkan dapat memberikan posisi yang strategis dan sumber kekuatan untuk dapat melanjutkan peperangan. Panglima Angkatan Bersenjata Belanda, atas nama angkatan Perang Serikat di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang tanggal 8 Maret 1942, Begitu pula dengan Gubernur Jenderal Belanda terakhir di Indonesia, Tjarda Van Strakerbourgh Stochouwer, menerima nasib sebagai tawanan.

Usaha Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia, terutama rakyat Jawa, dilakukan dengan cara menghubungkan dengan kehidupan keraton di Pulau Jawa. Pada waktu itu, Ramalan Jayabaya sangat mempengaruhi jiwa dan jalan pikiran rakyat di Pulau Jawa. Oleh karena itu, Jepang memanfaatkannya untuk menarik perhatian rakyat Pulau Jawa terhadap kemenangan-kemenangan Jepang di daerah Pasifik.

Di kalangan penduduk Pulau Jawa, Ramalan Jayabaya mulai tersiar lagi dari mulut ke mulut. Ramalan itu menyatakan bahwa sebelum zaman aman dan makmur tiba, perang Pasifik akan pecah. Di dalam perang itu “bangsa kulit kuning dari utara” akan datang mengusir penjajah, mereka tinggal hanya “seumur jagung” sesudah itu Indonesia akan merdeka (*CL. Geertz, 1964 : 116*).

Oleh karena itu Indonesia percaya, kedatangan tentara Jepang disambut dengan gembira. Rakyat Indonesia percaya bahwa kedatangan tentara Jepang itu benar-benar hendak membebaskan Indonesia dari cengkeraman penjajah Belanda, sesuai dengan surat-surat selebaran yang mereka sebarkan sebelum mendarat di Pulau Jawa. Di antara surat

selebaran itu ada yang ditujukan kepada Susuhunan Surakarta dan Sultan Yogyakarta, yang kira-kira berbunyi sebagai berikut :

“Raja-raja di Jawa, perintahkanlah Serdadu Tuan meninggalkan barisan Belanda, dan kita datang tidak untuk memerangi Tuan dan serdadu Tuan. Leluhur Tuan, Raja Joyoboyo di Kediri, pernah berkata bahwa bangsa kulit kuning akan datang menolong tuan dan bangsa Tuan; dan sekaranglah kami datang untuk menolong”. (A.G. Pringgodigdo, 1977:87).

Di seluruh pulau Jawa, kedatangan tentara Jepang itu disambut dengan pengibaran Sang Merah Putih di samping bendera Jepang Hinomaru; dan dengan nyanyian lagu Indonesia Raya. Banyak orang mengira tidak lama lagi Indonesia akan merdeka “seumur jagung”, yang berarti kurang lebih 100 hari dinanti-nanti dengan penuh berdebar-debar. Di Jakarta misalnya, telah direncanakan suatu susunan badan pemerintah Indonesia yang terdiri dari: Abikusno Tjokrosoejoso sebagai Perdana Menteri, Ir. Soekarno yang saat itu masih dalam tahanan di Sumatera, sebagai wakil Perdana Menteri dan beberapa pimpinan nasional lainnya sebagai Menteri.

Tetapi tindakan ini ternyata tidak mendapat persetujuan dari pihak Jepang. Pada tanggal 20 Maret 1942, diumumkan Undang-undang No.3 yang melarang dilakukannya perbincangan pergerakan atau propaganda mengenai peraturan dan susunan negara. Undang-undang tersebut disusul dengan Undang-undang No.4 yang menyatakan bahwa hanya bendera Jepang yang boleh dikibarkan. Hal itu berarti bahwa pengibaran Sang Merah Putih dilarang. Di samping itu lagu Indonesia Raya pun tidak boleh dinyanyikan, sehingga dengan demikian hanya lagu Kimigayo lah yang boleh diperdengarkan.

Larangan kedua hal tersebut, sangatlah menggelisahkan bangsa Indonesia, sadarlah mereka bahwa penjajah Belanda kini berganti dengan penjajah Jepang. Bendera Merah Putih Biru diganti dengan Bendera Matahari Terbit, lagu *Wilhelmus* dengan lagu *Kimigayo*, dan “Lang Lene de Koning in” menjadi “Tenno Heika Banzai”.

Di dalam usaha “Men-Jepangkan Indonesia” dikeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa pada hari-hari besar hanya bendera Jepang yang boleh dikibarkan, sedang lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah lagu Kimigayo. Mulai 1 April 1942, waktu yang dipakai adalah waktu Jepang atau waktu Tokyo. Perbedaan antara waktu Jepang dengan waktu Jawa ialah 90 menit. Mulai tanggal 29 April 1942 tarikh yang berlaku ialah Tarikh *Sumera* dan tahunnya adalah tahun 2602. Di samping itu, setiap tahun rakyat Indonesia diharuskan merayakan hari raya *Tenchosetsu*, yaitu hari lahir Kaisar Hirohito atau Tenno Heika.

Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia diperintah oleh Pemerintahan Militer yang membagi wilayah menjadi tiga daerah pemerintahan, yaitu :

1. Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Rikugun), dipegang oleh tentara keduapuluh lima, meliputi wilayah Sumatera dengan kedudukan di Bukit Tinggi.
2. Pemerintahan Militer Angkatan Darat yang dipegang oleh tentara keenam belas, meliputi Jawa dan Madura dengan berkedudukan di Batavia (waktu itu namanya belum Jakarta)
3. Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Kaigun), dipegang oleh Armada Selatan kedua, meliputi wilayah Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat (waktu itu belum Irian Jaya) dengan berkedudukan di Makasar (*M.A. Azis, 1955:160-161*).

Peraturan Tata Negara yang dipakai pada waktu itu, ialah Undang-undang No.1 tahun 1942. Berdasarkan undang-undang itu, Jabatan Gubernur Jenderal ditiadakan dan sebagai gantinya pimpinan dipegang oleh *Gunsyireikan* (Panglima Tentara) yang kemudian disebut *Saiko Syikikan*.

Dalam pemerintah Militer Angkatan Darat, dibentuk pemerintah *Gunsei*, sedangkan pada pemerintah Angkatan Laut, dibentuk pemerintah *Minseifu* yang berpusat di Makasar. *Minseifu* terdiri atas tiga bagian yang masing-masing berpusat di Kalimantan, Sulawesi, dan Seram.

Sedangkan daerahnya meliputi “*Syu, Ken, bunken (sub kabupaten), gun dan Son.*

Untuk memudahkan hubungan pemerintah Angkatan Laut dan pemerintah Angkatan Darat di Jawa, dalam rangka menjamin kebutuhan-kebutuhan Angkatan Laut, maka dibuka kantor penghubung Angkatan Laut (Bukanfu) di Jakarta, yang dipimpin oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda.

Mengenai peraturan keuangan, diatur oleh Undang-undang No.2 tanggal 8 Maret 1942. Dalam undang-undang tersebut, ditetapkan bahwa untuk kepentingan jual-beli dan pembayaran lainnya adalah mata uang rupiah Hindia Belanda, sedangkan pemakaian mata uang lain dilarang keras (*A.G. Pringgodigdo 1952 :14-15*).

Perubahan peraturan yang dilakukan pemerintah Militer Jepang terhadap peraturan pemerintah Hindia Belanda yang masih dipakai di Indonesia, diikuti dengan dilakukannya pemecatan kepada para pegawai bangsa Belanda, serta membentuk pemerintahan setempat.

Akan tetapi, usaha yang dilakukan pemerintah Militer Jepang itu tidak dapat berjalan lancar, karena Jepang mengalami kekurangan pegawai. Keadaan tersebut, disebabkan oleh karena kapal yang mengangkut pegawai dari Jepang yang direncanakan menggantikan pegawai Belanda yang telah dipecat itu, di tengah perjalanan terkena torpedo Sekutu (*M.A. Azis, 1955 : 158*).

Sehubungan dengan kejadian itu, maka untuk mengisi kekosongan pegawai diangkat pegawai-pegawai bangsa Indonesia. Namun demikian, pegawai bangsa Indonesia hanya menjabat sebagai wakil atau pendamping saja. Di Jawa Barat, Gubernur Kolonel Matsui didampingi oleh R. Pandu Suradiningrat sebagai Wakil Gubernur, di Jawa Tengah, Gubernur Letnan Kolonel Taga didampingi oleh Muhamad Chalil sebagai Wakil Gubernur, H. Dahlan Abdullah diangkat sebagai Kepala pemerintahan kota Batavia. Akan tetapi pemerintahan itu hanya bersifat sementara, sampai akhirnya dikeluarkan peraturan baru.

Pada bulan Agustus 1942, Pemerintah Militer Jepang mengeluarkan Undang-undang No.27, tentang aturan Pemerintah *Syu*

dan *Tokubetsu Syi*. Isi Undang-undang itu antara lain, disebutkan bahwa pulau Jawa dan Madura kecuali *koci* (Daerah Istimewa) Surakarta dan Yogyakarta, dibagi atas *Syu* (Keresidenan), *Syi* (Kotamadya), *Ken* (Kabupaten), *Gun* (Kewedanaan), *Son* (Kecamatan) dan *Ku* (Desa). Dengan demikian pemerintahan sementara telah berakhir (*A.G. Pringgodigdo, 1952: 22-23*).

Adanya peraturan tersebut, telah mengubah status propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadi pemerintahan *Syu*. Jumlah *Syu* di Pulau Jawa ada 17 buah, yaitu Banten, Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kudus, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki dan Madura.

Pemerintah *Syu* dipimpin oleh seorang *Syukokan*, dan kekuatannya sama dengan Gubernur, sedangkan daerah kekuasaannya sama dengan Keresidenan. Untuk Batavia, ditetapkan sebagai *Tokubetsu Syi* (kota praja Istimewa) sedangkan Sumatera dibagi menjadi 10 *Syu* yaitu: Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Bangka-Belitung. Setiap *syu* terdiri atas, *bunsyu* (sub-keresidenan), *gun* dan *son*. Untuk jabatan tinggi dalam pegawai pemerintahan ini, dipegang oleh orang Jepang. Sedangkan jabatan yang disediakan untuk bangsa Indonesia, hanya meliputi *Gunco* dan *Sonco* (*G.S. Kanahale, 1967: 35*).

Dalam usaha mempersatukan semua orang Asia yang pro Jepang, dibentuk Gerakan Tiga A yang mengumandangkan semboyan “Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia”. Gerakan tersebut dimaksudkan oleh Jepang untuk merangkul semua orang Asia, dan menggantikan semua organisasi politik, kultural, dan agama yang ada di Jawa, akan tetapi kini terjadi dua macam tujuan yang berlawanan, di satu pihak yaitu tujuan Jepang yang ingin memobilisasi seluruh rakyat Asia Timur untuk kepentingan perangnya dan mewujudkan “daerah kemakmuran bersama Asia Timur Raya” yang dipimpin oleh Jepang. Di lain pihak, terdapat tujuan bangsa Indonesia yang ingin mengusir penjajah. Kekecewaan pada kedua pihak itu nantinya akan bangkit dan memupuk saling kecurigaan.

Pemimpin Gerakan Tiga A ialah Mr. Samsudin, yang dipandang oleh Mr. Ahmad Soebardjo, sebagai seorang tokoh nasional yang dikenal lunak. Untuk menyebarkan slogan Gerakan Tiga A itu, diikutsertakan pula seorang propagandis Jepang, Hitoshi Shimizu, dengan pidato-pidatonya dalam bahasa Indonesia yang fasih. Selain itu penyebaran slogan dilakukan Jepang dengan penerbitan harian, yaitu harian "Asia Raya".

Ternyata Gerakan Tiga A hanya berusia beberapa bulan saja, H.J. Benda menilai, bahwa Gerakan Tiga A itu dibentuk oleh pejabat-pejabat sipil dalam Badan Propaganda tanpa didukung oleh pejabat-pejabat militer yang memandang gerakan itu dengan curiga. Akhirnya Gerakan Tiga A menemui akhir yang merana dan mati, karena solidaritas Asia menentang Barat di bawah *hegemoni* Jepang merupakan suatu hal yang bagaimanapun akan memancing sambutan lunak dari orang-orang Indonesia.

Menurut George S. Kanahela, sebab dibubarkannya Gerakan Tiga A, karena adanya perpecahan diantara penguasa Jepang. Staf *Gunseikan* menuduh Gerakan Tiga A telah menjadi suatu organisasi massa, padahal seharusnya merupakan gerakan propaganda. Sedangkan ketentuannya, organisasi massa harus berada di bawah pengawasan "*Gunseikanbu*". Oleh karena itu, sarjana-sarjana Jepang sendiri mengatakan bahwa Gerakan Tiga A, adalah suatu drama komedi yang ditulis dan dipentaskan oleh Hitoshi Shimizu, dan dimainkan oleh orang Indonesia. (*G.S. Kanahel, 1967: 43-49*).

Terlepas dari pendapat tersebut, Jepang mulai sadar bahwa Gerakan Kebangsaan Indonesia merupakan suatu gerakan yang nyata dan kuat. Kesadaran ini, menyebabkan mereka mengubah garis politiknya. Mereka lalu berpaling kepada pemimpin-pemimpin nasionalis yang mereka anggap benar-benar memiliki dukungan nyata dari rakyat. Dengan latar belakang politik ini, Jepang memutuskan untuk menampilkan tokoh-tokoh nasionalis Soekarno dan Hatta, yang merupakan tokoh-tokoh nasionalis terkenal, maka kedua tokoh ini dibebaskan dari tahanan politik pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu, Soekarno berada di pengasingan di Sumatera, sedangkan Hatta di Sukabumi.

Dalam pertemuan antara Soekarno dan Hatta, keduanya mengambil keputusan untuk menyampingkan perselisihan pahamnya dari zaman Partindo dan PNI baru, untuk kemudian bersatu memimpin rakyat Indonesia. Persatuan antara keduanya kemudian dikenal dengan sebutan “Dwi Tunggal”.

Kesediaan Soekarno dan Hatta untuk bekerja sama dengan Jepang itu, karena adanya jaminan kemerdekaan Indonesia. Kerja sama “Dwi Tunggal” dengan pihak Jepang ini, dimulai dalam suatu komisi penyelidikan adat-istiadat dan Tata-negara yang dibentuk oleh *Gunseikan* pada tanggal 8 Nopember 1942.

Kelanjutan dari kerjasama tersebut, pada tanggal 9 Maret 1943, dibentuk POETERA (Poesat Tenaga Rakyat), di bawah pimpinan Empat Serangkai yang terdiri dari, Ir. Soekarno, Hatta, K.H. Mas Mansoer dan Ki Hajar Dewantara. Berdirinya gerakan tersebut, dimungkinkan pembentukannya atas usul golongan nasionalis yang diwakili oleh Ir. Soekarno (*Sartono K, V 1. 1977 : 11*).

Keikutsertaan *K.H. Mas Mansoer* dan Ki Hajar Dewantara dalam kepemimpinan POETERA, disebabkan karena K.H. Mas Mansoer bekas ketua Muhammadiyah yang disegani, sedangkan Ki Hajar Dewantara adalah tokoh Pendidikan Taman Siswa. Oleh karena itu, pengaruh mereka sangat besar terhadap masyarakat.

Atas pertimbangan yang matang dan jaminan bahwa POETERA dapat mempersatukan rakyat guna mengabdikan kepada usaha-usaha perang, akhirnya Jepang menyetujui gerakan itu. Pemerintah Jepang mempunyai tujuan agar POETERA dapat memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha-usaha pemerintahan militer Jepang. Hal ini dapat terlihat dari peraturan dasar organisasi tersebut, antara lain :

- a. Memimpin rakyat agar kuat rasa tanggung jawabnya, serta kewajibannya menghapus pengaruh Amerika, Inggris dan Belanda.
- b. Mengambil bagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya.
- c. Mendalamkan pengertian persaudaraan Indonesia dan Jepang.

- d. Mengintensifkan pelajaran-pelajaran bahasa Jepang, dan
- e. Mempropagandakan sebagai tersebut di atas.

POETERA disusun atas pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Pimpinan daerah dibagi sesuai dengan tingkat daerahnya. Sedangkan pimpinan pusat masing-masing bagian disebut pejabatan, yaitu :

- a. Pejabatan Susunan Pembangunan
- b. Pejabatan Usaha dan Budaya
- c. Pejabatan Propaganda

Usaha Pengembangan POETERA, dimulai pada bulan April 1943, dengan diangkatnya pemimpin tertinggi, Ir. Soekarno yang dibantu oleh Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mas Mansoer. Disamping itu, diangkat beberapa penasehat bangsa Jepang, yaitu Mijoshi, bekas konsul Jepang di Jakarta, G. Taniguchi, pemimpin Surat Kabar "To Indo Nippon", Ichiro Yamasaki, pemimpin badan perdagangan dan Akiyama dari Yokohama Bank (Asia Raya, 10 Maret 1943). Adanya penasehat bangsa Jepang itu, merupakan pengawasan terhadap para pemimpin POETERA, sehingga membatasi tindak tanduk mereka.

Perkembangan dan aktifitas POETERA telah menunjukkan keberhasilannya dalam mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan Indonesia, dan bukan tujuan yang diinginkan oleh Jepang. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya, mengatakan: "Para Pemimpin POETERA bersumpah di dalam hatinya masing-masing, bahwa kemerdekaan seratus persenlah yang akan dikejar secara gerilya politik". (*Ki Hajar Dewantara, 1952: 122*).

Keberhasilan POETERA dalam membina rakyat secara luas, dicapai dengan cara mengadakan rapat raksasa, maupun melalui siaran radio. Dilain pihak, POETERA di tingkat *Syu* dan daerah yang bertingkat lebih rendah tidak dapat berkembang pesat. Penyebab kurang pesatnya POETERA, adalah kondisi sosial-ekonomi. Di samping itu, walaupun POETERA sebagai organisasi resmi pemerintah. bantuan dan pemerintah tidak dapat dirasakan. Sehubungan dengan itu,

POETERA harus mengerahkan dana iuran anggota serta keuntungan badan-badan perdagangan yang didirikan untuk penghidupannya. Pihak Jepang mulai menyadari, bahwa POETERA lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia, sehingga kurang menunjukkan dukungannya kepada pemerintah Jepang. Oleh karena itu, Jepang mulai memikirkan pembentukan organisasi baru yang dapat mencakup semua golongan masyarakat.

Berdasarkan “Osamu Sirei” No.44, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 1943, mengenai pembentukan “Pasukan Sukarela” untuk membela Jawa baik oleh *Gunsyireikan* maupun *Gunseikan* dijelaskan, bahwa pembentukan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) adalah penting. Selain itu, ditekankan bahwa perang Asia Timur Raya adalah perang bagi seluruh Asia dan kemenangan dalam perang merupakan kemenangan bagi orang Asia. Dengan demikian orang Asia diwajibkan untuk ikut dalam usaha mencapai kemenangan akhir.

Proses pembentukan PETA, dimulai dengan usul R. Gatot Mangkoepradja, melalui suratnya yang ditujukan kepada *Gunseikan*, pada tanggal 8 September 1943, yang meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu Pemerintah Militer Jepang. Bukan saja di garis belakang tetapi juga di medan perang. Akan tetapi di balik usul itu sebenarnya pemerintah Jepang memeralat R. Gatot Mangkoepradja untuk membuat usul tersebut. Tujuannya adalah agar pembentukan PETA mendapat dukungan rakyat Indonesia yang tergabung dalam PETA. (*Nugroho Notosusanto, 1979: 13-14*).

Organisasi militer lain yang dibentuk Jepang ialah *Keibondan* semacam barisan-barisan polisi. Tujuan Jepang mendirikan organisasi militer tersebut, disebabkan oleh karena sejak tahun 1943 situasi perang telah berubah, sikap *ofensif* Jepang beralih ke sikap *defensif*. Serangan-serangan Sekutu di daerah Pasifik mulai dirasakan. Untuk menghadapi keadaan gawat itu, Jepang berusaha mengumpulkan dan mendidik kaum muda Indonesia dalam bidang militer secara intensif.

Pada waktu itu golongan pemuda mendapat perhatian juga dan Pemerintah Pendudukan Jepang. Hal ini antara lain, disebabkan

golongan ini umumnya memiliki semangat yang tinggi, giat, dan biasanya masih diliputi idealisme. Mereka belum sempat dipengaruhi oleh alam pikiran Barat. Dengan demikian maka propaganda dan pihak Jepang diduga akan mudah dapat ditanamkan. Untuk itu, maka salah satu pelajaran yang ditekankan ialah *Seisyin* atau semangat. Semangat yang diutamakan ialah semangat ksatria atau *Busyido* yakni berbakti kepada tuannya atau pemimpinnya dan orang tuanya. Selain itu, ditekankan pula perlunya disiplin dan diberantasnya rendah diri serta semangat budak. Realisasi dari pendapat tersebut, Jepang meresmikan gerakan “*Seinendan*” atau Barisan Pemuda Indonesia untuk menjadi *Heiho* atau pembantu prajurit Jepang. *Seinendan Dojo* di Tangerang, merupakan tempat latihan pemuda yang pertama. Para pemuda tersebut, dilatih militer dengan senjata-senjata tiruan yang terbuat dari kayu.

Dalam menghadapi kekuatan Serikat, Jepang berusaha menjadikan seluruh daerah yang didudukinya sebagai rangkaian pertahanan yang kompak, dimana seluruh penduduk dengan bahan yang ada di daerahnya dikerahkan. Pengerahan penduduk, tidak hanya terdiri dari penduduk asli, tetapi berlaku untuk semua golongan yang ikut serta dalam usaha melawan Serikat. Demikianlah pada tanggal 8 Januari 1944, diperkenalkan sistem *Tonarigumi* (Rukun Tetangga), yang dimaksudkan untuk memperketat pengendalian terhadap penduduk (*Kan Po*, 25 Januari 1944 : 19).

Oleh karena perang semakin mendesak Jepang, maka kewajiban yang harus dilakukan *Tonarigumi* secara aktif. Kewajiban itu antara lain mengadakan latihan bersama-sama dalam pencegahan bahaya udara, kebakaran, pemberantasan mata-mata musuh dan penyampaian ikhtiar pemerintah militer kepada penduduk serta dianjurkan menambah hasil bumi dan berbakti kepada pemerintah militer dalam bidang lain. (*Djawa Baroe*, No. 3 Th. 1944 : 7).

Setelah sistem itu berjalan lancar, dibentuk *Djawa Hokokai*. Organisasi yang dilebur ke dalam *Djawa Hokokai* antara lain, *Fujinkai* (Perkumpulan Kaum Wanita), *Masjumi*, *KAKYO SOKAI* (Perhimpunan Cina), *Taikukai* (Perkumpulan Olah Raga), dan *Keimin Bunka Syodosyo* (Himpunan Kebudayaan). (*Asia Raya*, 19 Maret 1944).

Djawa Hokokai (Perhimpunan Kebaktian Jawa) didirikan pada tanggal 8 Januari 1944, oleh Panglima Tentara Keenam belas, Jenderal Kumakichi Harada yang sebelumnya telah membubarkan POETERA.

Alasan didirikannya *Djawa Hokokai*, karena semakin menghebatnya segenap tenaga rakyat secara lahir bathin. Dasar pengertiannya, adalah dari *Hokoseisyin* (Semangat Kebaktian), yang mempunyai tiga dasar, yaitu :

1. Mengorbankan diri.
2. Mempertebal Persaudaraan.
3. Melaksanakan sesuatu dengan bukti.

Djawa Hokokai, merupakan lembaga yang *Integral* dengan tubuh Pemerintahan. Sedangkan tujuannya adalah mempersatukan semua kekuatan Sosio Ekonomi dan kultural, serta kekuatan-kekuatan politik untuk menyelesaikan perang dengan tenaga dan materiil yang ada.

Pengawasan *Djawa Hokokai* langsung dipimpin oleh *Gunseikan*. Demikian pula *Syukokan* sampai *kuco* adalah pemimpin-pemimpin *Djawa Hokokai*, secara *ex officio*. Sedangkan kegiatannya, sebagaimana digariskan dalam peraturan dasarnya meliputi :

- a. Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang.
- b. Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segala bangsa.
- c. Memperkokoh pembelaan tanah air.
- d. Memperteguh kehidupan di masa perang. (Peratoeran Kebaktian Rakyat, 1944: 28)

Sekitar akhir tahun 1942 kedudukan pasukan Jepang di Pasifik mulai terdesak, karena serangan balas (Counter Offensive) pasukan Sekutu. Untuk menarik dukungan penduduk setempat, maka Jepang merencanakan memberi kemerdekaan kepada Burma dan Philipina, yang disampaikan Perdana Menteri Tojo pada akhir Januari 1943. Akan tetapi Perdana Menteri Tojo tidak menyinggung rencana

pemberian kemerdekaan kepada Indonesia. Dalam hubungan ini tokoh nasionalis utama, Soekarno dan Hatta mengajukan protes kepada Jepang melalui *Gunseikan*, dan mengatakan tidak bertanggung jawab terhadap dukungan bangsa Indonesia untuk peperangan Jepang. Protes tersebut sangat beralasan karena secara sosio kultural dan politik, bangsa Indonesia lebih maju daripada Burma dan Philipina. Akhimya protes tersebut diteruskan ke Tokyo, dan pemerintah Jepang di Tokyo mengirimkan Menteri Kemakmuran Asia Timur Raya, Aoki yang mengunjungi Indonesia pada bulan Mei 1943, dan disusul Perdana Menteri Tojo pada bulan Juli 1943.

Menanggapi protes tokoh nasionalis tersebut, pemerintah Jepang di Tokyo dalam “Konferensi Penghubung”, mengambil keputusan untuk menanggukhan pemberian kemerdekaan bagi Burma dan Philipina. Sedangkan untuk Indonesia, ditempuh kebijaksanaan partisipasi politik (Seiji Sanyo) :

1. Pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat (Chuo Sangi-in).
2. Pembentukan Dewan Pertimbangan Keresidenan (Shu Sangikai).
3. Penunjukan penasehat-penasehat Indonesia di departemen-departemen.
4. Pengangkatan orang-orang Indonesia ke dalam Pemerintah dan organisasi resmi lainnya.

Pemerintah Jepang yang semula tidak mempunyai rencana memberi kemerdekaan terhadap Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri Tojo dimungkinkan karena apabila Indonesia diberikan kemerdekaan, maka eksploitasi Jepang di Indonesia akan terganggu. Sedangkan Indonesia merupakan pertahanan kekuatan yang terpenting di Asia Tenggara.

Dari gambaran di atas, tampak sekali bahwa Jepang sangat membutuhkan bantuan rakyat guna kepentingan perangnya, yaitu menahan *ofensif* sekutu yang semakin dahsyat. Berdasarkan Keputusan sidang Parlemen ke 82 di Tokyo, dikemukakan oleh Perdana Menteri Tojo di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1943.

Antara lain menyatakan :

“.....kini Jawa mempunyai kedudukan yang paling penting dalam suasana perang Asia Timur Raya. Oleh sebab itu, usaha seluruh rakyat Jawa memberikan pengaruh yang sangat besar dalam usaha perang ini. Baru-baru ini dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Jepang, saya menyatakan agar tahun ini juga pemerintah di Tokyo memberi kesempatan pada penduduk asli Jawa untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negeri Jawa secepat mungkin. Berhubung dengan itu, saya berharap kepada sekalian penduduk asli Jawa agar sadar dan insaf akan tujuan dan pendirian Jepang yang sebenarnya, serta memusatkan dan membulatkan segala tenaga dalam usaha pemerintahan, ekonomi, budaya dan bekerja mati-matian untuk melaksanakan cita-cita pembentukan Jawa Baru” (*Pandji Poestaka*, No. 2027, 1943 : 191).

Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 1943, menyusul pengumuman *Saiko Syikikan*, Jenderal Kumakichi Harada yang menggantikan Letnan Jenderal Histoshi Imamura, mengumumkan tentang garis besar rencana pengambilan bagian dalam pemerintah, meliputi badan-badan pertimbangan, baik di pusat maupun di daerah, penasehat-penasehat pada Departemen Pemerintah Pendudukan Militer Jepang, dan jabatan tinggi lainnya bagi orang Indonesia.

Sebagai tindak lanjut rencana tersebut, bulan Oktober 1943, Prof. Hoessein Djajadiningrat diangkat menjadi Kepala Departemen Urusan Agama (*Shumubu*). Jabatan tersebut merupakan posisi tinggi pertama di Pusat Pemerintah Militer Jepang yang diduduki orang Indonesia. Sebelumnya pada bulan September 1943 orang Indonesia sebanyak 7 orang, hanya diangkat sebagai penasehat (*Sanyo*). Ketujuh orang itu, adalah Ir. Soekarno pada *Somubu* (Departemen Urusan Umum), Mr. Soewandi dan dr. Abdoel Rasjid pada *Naimubu* (Departemen Urusan Dalam Negeri), Prof. Dr. Mr. Soepomo pada *Shihobu* (Departemen Kehakiman), Mochtar bin Praboe Mangkoenegoro pada *Kotsubu* (Departemen Lalu Lintas), Mr. Moehammad Yamin pada *Sendenbu* (Departemen Propaganda), dan Prawoto Soemodilogo pada *Sangyobu*

(Departemen Perekonomian). Sedangkan pada bulan Nopember 1943, Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo diangkat menjadi *Syucokan* (Kepala Keresidenan) di Jakarta. Orang-orang yang diangkat ini adalah orang-orang yang terkemuka di Jawa (*Kan Po*, 31, 25 Nopember 1943(2603) : 4).

Partisipasi politik bangsa Indonesia dalam pemerintahan Jepang sebenarnya untuk mempromosikan kerja sama penduduk Jawa yang merupakan kunci penting dalam memperkuat pertahanan di wilayah Asia Tenggara.

Sehubungan dengan tujuan itu, pada tanggal 5 September 1943, *Saiko Syikikan* mengeluarkan "Osamu Seirei" No.36 dan 3 tentang pembentukan *Chuo Sangi-in* dan *Shu Sangi Kai*. Pada pasal 1 "Osamu Seirei" No.36 disebutkan :

"Dengan maksud untuk memajukan usaha pemerintah dengan pesat, maka diadakan *Chuo Sangi-in* berada di bawah pengawasan langsung dari *Saiko Syikikan*, dan tentang urusan pemerintahan *Chuo Sangi-in* memberi jawaban atas pertanyaan *Saiko Syikikan* serta mengajukan usul-usul kepada *Saiko Syikikan*. (*Kan Po*, 26 September 1943: 29).

Chuo Sangi-in (Dewan Pertimbangan Pusat), bertempat di Jakarta sedangkan *Shu Sangi Kai* (Dewan Pertimbangan Daerah), didirikan di 17 Keresidenan, di Jakarta serta di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Anggota badan tersebut, terdiri dari 43 orang, yaitu 23 orang diangkat oleh *Saiko Syikikan*, 18 orang utusan dan tiap Keresidenan dan Kotapraja Jakarta, serta 2 orang utusan dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Berdasarkan "Osamu Seirei" No. 36 dan 37 itu, masalah yang dapat dirundingkan harus menyangkut :

1. Pengembangan Pemerintah Militer,
2. Mempertinggi derajat rakyat,
3. Pendidikan dan Penerangan,
4. Industri dan Ekonomi,

5. Kemakmuran dan Bantuan Sosial,
6. Kesehatan.

Akan tetapi, masalah itu hanya diarahkan kepada usaha untuk membantu keperluan Asia Timur Raya. Dengan demikian sangat bertentangan sekali dengan arti sebenarnya. Bahkan sebaliknya derajat rakyat, kemakmuran, bantuan sosial maupun kesehatan rakyat Indonesia semakin menurun.

Keterbatasan bertindak dalam *Chuo Sangi-in*, menimbulkan rasa tidak puas dari para nasionalis Indonesia, karena jawaban atau usulan yang diajukan Dewan ini belum tentu diterima oleh pemerintah Militer Jepang. Selain itu, partisipasi politik bangsa Indonesia hanya berlaku di Jawa saja. Keadaan itu dimungkinkan karena sikap penguasa Angkatan Laut mengenai wilayah yang didudukinya lebih *konservatif*, sehingga wilayah yang didudukinya dianggap akan tetap menjadi milik kemaharajaan Jepang. Oleh karena itu di wilayah Angkatan Laut gerakan nasionalis lebih ditindas. (*Shigetada Nishijima, 1963 : 367-268*).

Di samping itu Pemerintah Militer Jepang menerangkan bahwa para anggota dewan harus menyadari tentang tidak adanya tempat dalam dewan itu untuk birokrasi yang tidak perlu dari orang Indonesia yang sombong. (*Kan Po, 25 Agustus 1943 (2603) : 13*).

Ir. Soekarno berpendapat, tentang perbandingan antara *Chuo Sangi-in* dengan *Volksraad* (Dewan yang ada pada jaman kolonial Belanda). Meskipun dalam *Volksraad* ada ketidakberdayaan, dalam mengkritik kenyataan dapat mengeritik pemerintah dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan semua aspek kolonial. Sedangkan dalam *Chuo Sangi-in* hal tersebut tidak ada. (*Kan Po, 25 Agustus 1943 : 13*).

Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua *Chuo Sangi-in* dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1943. Secara resmi diangkat Ir. Soekarno sebagai ketua dan 2 wakil ketua, yaitu RM. AA. Koesoemo Oetoyo dan Dr. Boentaran Martoatmodjo. Pelantikan tersebut dilakukan oleh

Zimukyokuchō (Para anggota dan sekretariat). (*Tjahaya*, 17 Oktober 1943).

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa Dewan yang dibentuk oleh pemerintah Militer Jepang, merupakan organisasi yang efektif dalam upaya mendorong masyarakat Indonesia agar menyadari dan bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka sesuai dengan keinginan Jepang. Hal ini juga dapat terlihat dari kegiatan *Chuo Sangi-in* yang dibatasi oleh pemerintah Militer Jepang. Tindakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Militer Jepang takut akan timbul reaksi yang berlawanan dari rakyat melalui *Chuo Sangi-in*. Untuk itu seluruh persoalan yang akan dibicarakan harus terlebih dahulu diserahkan kepada *Zimukyoku* (sekretariat) secara tertulis.

Pada tanggal 5-6 Nopember 1943 di Tokyo diadakan Konferensi Asia Timur Raya. Dalam konferensi itu dibicarakan masalah hubungan tertutup antara Jepang, Manchukuo, Cina, Filipina, Thailand dan Burma. Ketika itu, Indonesia tidak diundang walaupun dianggap sebagai salah satu anggota Asia Timur Raya. Hal tersebut mengecewakan rakyat Indonesia, untuk menghilangkan kekecewaan bangsa Indonesia, dan untuk menarik simpati bangsa Indonesia, tiga tokoh Indonesia dengan diantar oleh 2 orang Jepang diterbangkan ke Tokyo. Mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Hatta dan Ki Bagoes Hadji Hadikoesoemo. Sedangkan kedua orang Jepang itu adalah Mijoshi dan Terada Kuchi.

Ketiga tokoh Indonesia yang diterbangkan ke Tokyo itu merupakan Delegasi dari *Chuo Sangi-in*. Mereka tiba di Tokyo pada tanggal 15 Nopember 1943. Seluruh surat kabar di Indonesia menyiarkan kunjungan ini, begitu pula kantor penerangan di Tokyo mengumumkan kunjungan ini, yang antara lain berbunyi sebagai berikut

“... .. Atas nama seluruh penduduk Indonesia, delegasi menyatakan terima kasih atas diberikannya kesempatan untuk kerja sama dalam pemerintah”.

Publikasi ini diakhiri dengan kata-kata sebagai berikut :

“.....Delegasi Indonesia akan melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana keadaan Jepang yang merupakan pusat kegiatan untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Mereka akan mengetahui kekuatan Jepang, karenanya diharapkan delegasi ini memberi bantuan semaksimal mungkin untuk menggugah semangat dari pada penduduk Jawa untuk membantu perang. (*MA. Azis, 1955: 217-218*).

Selama kunjungan di Jepang, Delegasi *Chuo Sangi-in* diperlakukan secara berlebihan. Di samping itu diperlihatkan pula pabrik-pabrik baja, amunisi, kapal untuk kepentingan perang. Dalam pertemuan mereka dengan Perdana Menteri Tojo, delegasi meminta keterangan mengenai status Indonesia. Selain itu menanyakan tentang perizinan pengibaratan “Sang Merah Putih”, dan menyanyikan lagu “Indonesia Raya”, serta mendesak agar Indonesia disatukan di bawah satu pemerintahan. Akan tetapi, permintaan itu ditolak. Tojo tidak dapat memberikan jaminan, kecuali sesudah Jepang menang atas Sekutu. (*GS. Kanabele, 1967: 108*).

Pada tanggal 16 Nopember 1943, delegasi *Chuo Sangi-in* diterima oleh Tenno Heika. Atas jasa-jasanya kepada pemerintah militer di Jawa, maka ketiga tokoh itu mendapat penghargaan berupa bintang Ratna Suci kelas dua (Kun Nito Suiho-Sho). Drs. Moh. Hatta dan Ki Bagoes Hadji Hadikoesoemo, sebagai anggota *Chuo Sangi-in*, mendapat bintang Ratna Suci kelas tiga (Kun Santo Zuiho-Sho). Bintang Ratna Suci ini biasanya diberikan kepada pegawai pemerintah yang telah berjasa, baik pemerintah militer maupun sipil. (*Soeara Moeslimin, 1, 1 Desember 1943: 6*).

Di samping golongan nasionalis dan golongan pemuda, golongan Islam pun mendapat perhatian dari Jepang. Oleh karena itu, untuk menarik simpati golongan Islam dilakukan pendekatan kepada para ulama yang mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat Indonesia. Golongan Islam merupakan golongan yang memperoleh

perhatian istimewa dari Jepang, sehingga memperoleh lebih banyak kelonggaran dibanding dengan golongan lain. Dalam rangka memberi kelonggaran kepada golongan Islam di Pulau Jawa, pemerintah Militer Jepang masih mengizinkan berdirinya organisasi Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) yang didirikan pada tahun 1937 di Surabaya, oleh K.H. Mas Mansoer dan kawan-kawannya. (*Soeara MIAI, th I No. 1, Januari 2603: 7*).

Usaha lain yang dilakukan Jepang untuk mendekati golongan Islam, adalah mendatangkan ahli agama Islam dan Jepang yang tergabung dalam *Somubu*. Ahli agama Islam itu diketuai oleh Kolonel Horie, sedangkan anggotanya antara lain, yaitu Abdul Muniam Inada, Saïdo Wakkasa, Abdul Hamid Ono, Muhammad Saleh Suzuki dan Abdul Munir Watanabe. Mereka bertugas setelah *Guriseikan* mengumumkan kebijaksanaan Jepang terhadap Islam pedesaan, dengan tujuan membuat ahli-ahli kitab suci dan guru-guru agama Islam menjadi pemimpin front sipil yang bertugas menjamin keamanan dan kesiagaan, serta menekan kewajiban Ulama di masa peperangan. Untuk itu, dilakukan perjalanan keliling Jawa serta mengadakan pertemuan dengan kyai-kyai setempat.

Selain itu pemerintah militer Jepang mengundang para pemuka Islam Indonesia serta menjamunya di Hotel Des Indes. Peristiwa itu merupakan suatu peristiwa yang tidak terimpikan pada waktu pemerintah Kolonial Belanda. (*HJ. Benda, 1980: 167, 287*).

Tujuan Jepang mendekati golongan Islam, karena Jepang menilai golongan Islam pada dasarnya anti Barat karena soal agama, sehingga diduga akan lebih mudah dirangkul. Oleh karena itu MIAI sebagai satus-atunya organisasi gabungan yang mewakili kepentingan umat Islam di Indonesia, diizinkan tetap berdiri oleh pemerintah Militer Jepang. Akan tetapi setelah dirubah anggaran dasar, azas dan tujuannya. Isi dari azas dan tujuan MIAI itu antara lain disebutkan "turut bekerja dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan membangun masyarakat baru, untuk mencapai kemakmuran di lingkungan Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon". (*Asia Raya, 19, 21 Januari 1943*).

Oleh karena MIAI di nilai oleh Jepang kurang memuaskan, maka pada bulan Oktober 1943 MIAI dibubarkan dan diganti dengan Majelis Sjoero Moeslimin (Masjoemi) yang disyahkan oleh *Gunseikan* pada tanggal 22 Nopember 1943. Masjoemi diketuai oleh KH. Mas Mansoer, KH. Faridd Ma'ruf, KH. Mukti, KH. Hasjim, Kartosudarmo, Nachrowi, Zainal Aripin, dan KH. Muchtar. (*Asia Raya*, 28 Nopember 1943).

Selain itu, para pemuka Agama Islam diberikan kesempatan untuk menjadi Bupati atau Kepala Daerah, bahkan Panji-panji PETA dilukiskan dengan lambang Islam, di atas lambang "Matahari Terbit". Akan tetapi pengaruh Jepang yang diterapkan pada golongan Islam banyak yang berlawanan dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu akibat yang ditimbulkan adalah terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dipimpin golongan ulama, seperti terjadi di Singaparna (Tasikmalaya) dan di Aceh.

Sebenarnya usaha Jepang itu gagal karena semua organisasi yang didirikan kurang menunjukkan dukungan kepada pemerintah Jepang. Namun sebaliknya aktifitas organisasi yang didirikan Jepang tersebut, telah mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan.

B. Janji Kemerdekaan Indonesia Di kemudian Hari

Pada awal tahun 1944 timbul perkembangan baru dalam politik pemerintah Militer Jepang di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya dua dokumen oleh Hayashi Kyujiro, selaku pejabat tinggi sipil pada Tentara keenam belas, dua dokumen tersebut berjudul "Hal-hal mengenai kemerdekaan Jawa dan wilayah lain". Dengan demikian, tampak bahwa gagasan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sudah ada persetujuan. Sedangkan yang menjadi masalah adalah wilayah kekuasaan negara Indonesia yang akan diberikan kemerdekaan. Menurut Hayashi Kujiro, wilayah itu dibatasi hanya pada Jawa, Madura dan Bali. Sedangkan wilayah lain, untuk sementara dianggap sebagai wilayah kemaharajaan Jepang yang akan ditinjau kembali setelah perang selesai. (*HJ. Benda, et-al*, 1965 : 240-248).

Timbulnya dokumen tersebut, dimungkinkan karena situasi Perang Pasifik tidak terlalu menguntungkan pihak Jepang. Sekitar pertengahan tahun 1944 di medan pertempuran, banyak tentara Jepang terdesak, berturut-turut kepulauan Saipan, Irian Timur, kepulauan Solomon dan Marshall jatuh ke tangan tentara Serikat. Dengan demikian seluruh garis pertahanan di Pasifik terancam yang berarti kekalahan Jepang telah di ambang pintu. Terbukti bahwa moral masyarakat mulai mundur, produksi perang merosot yang mengakibatkan kurangnya persediaan senjata dan amunisi. Di samping itu timbul soal-soal logistik karena hilangnya sejumlah kapal laut dan kapal perang. (*Brugmans, 1960: 65*).

Sehubungan dengan keadaan itu, *romusha* (Tenaga kerja) yang telah dipropagandakan Jepang sejak tahun 1943, sebagai “Prajurit Pekerja” atau “Prajurit Ekonomi”, lebih digiatkan lagi. Hal ini disebabkan, mereka dibutuhkan sebagai tenaga kasar untuk membuat sarana pertahanan, benteng, jalan raya dan sebagainya. *Romusha* digambarkan sebagai orang yang menunaikan tugas suci untuk angkatan perang Jepang, tetapi kenyataannya mereka hanyalah sebagai budak. Untuk mendapat dukungan rakyat, pada bulan September 1944 *romusha* sebanyak 500 orang yang terdiri dari pegawai tinggi dan menengah di bawah pimpinan Ir. Soekarno, bekerja selama seminggu di suatu tempat yang penting. Pekerjaan selama seminggu itu, disebut “Pekan Perjuangan Mati-matian”. (*Djawa Baroe, 1 Oktober 1944: 16-17*). Menurut WF. Wertheim, *romusha* banyak dikirim ke luar negeri, misalnya Burma, Muangthai, Vietnam dan Malaya. Sedangkan perlakuan pemerintah militer Jepang sangat buruk, kesehatan tidak terjamin dan makanan tidak cukup, sehingga banyak yang meninggal.

Disamping itu 300.000 *romusha* yang dikirim ke luar Jawa diperkirakan 70.000 dalam kondisi yang menyedihkan. (*WE Wertheim, 1959: 316*).

Faktor yang tidak menguntungkan tersebut menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944, sebagai penggantinya Jenderal Kuniaki Koiso tampil sebagai Perdana Menteri.

Pada bulan Agustus 1944, Kementerian Asia Timur Raya, menyatakan secara jelas bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan

yang wilayahnya adalah seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, selain itu terdapat pula beberapa usulan mengenai “Kemerdekaan Indonesia”, yaitu:

1. “Hal-hal mengenai kemerdekaan Jawa dan wilayah-wilayah lain”, usul dari Kementerian Asia Timur Raya, tanggal 25 Agustus 1944.
2. “Hal-hal mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang kemerdekaan Hindia Timur”, usul dari Kementerian Angkatan Darat, tanggal 26 Agustus 1944.
3. “Hal-hal mengenai kebijaksanaan tentang kemerdekaan Hindia Timur: laporan sementara”, usul dari Kementerian Luar Negeri, tanggal 28 Agustus 1944.
4. “Hal-hal mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang kemerdekaan Hindia Timur”, usul kedua dari kantor pemerintahan wilayah selatan, Kementerian Angkatan Darat, tanggal 29 Agustus 1944.

Persoalan terakhir yang ditekankan dalam usulan tersebut, adalah perlunya dibentuk suatu panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. (*HJ. Bendaet - al, 1965: 249-256*).

Politik Jenderal Kunaiki Koiso, ialah memperhebat usaha mencari “Teman Setia” di Asia. Pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang “Dai Nippon Teikoku Gikai” atau Dewan Perwakilan Rakyat Jepang, ia mengatakan bahwa “Hindia Timur” akan dimerdekakan di kemudian hari. Pernyataannya, adalah sebagai berikut :

“ tahun lalu, sesuai dengan keinginan kaum pribumi, kemaharajaan telah mengambil langkah-langkah yang menyangkut partisipasi politiknya dan kaum pribumi pun telah mengerti maksud sesungguhnya dari kemaharajaan dan secara tetap melanjutkan perjuangannya mencapai klimaks dari perang Asia Timur Raya. Menanggapi hal ini dan untuk kemakmuran Hindia Timur, bersama ini kemaharajaan menyatakan bahwa kemerdekaan akan dikukuhkan di kemudian hari”. (*HJ. Benda, et-al, 1965 : 259*).

Akan tetapi dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Dewan Bimbingan perang tertinggi, yaitu motivasi pemberian kemerdekaan Indonesia dinyatakan dengan jelas: “Untuk membantu penyelesaian dengan berhasilnya perang Asia Timur Raya, kemaharajaan menyetujui kemerdekaan bagi Hindia Timur” Adapun mengenai kemerdekaan itu akan diberikan secara bertahap atau keseluruhan, tetap belum dipecahkan. Untuk tujuan itu maka perlu dibentuk sebuah panitia persiapan kemerdekaan yang tugasnya menyelenggarakan persiapan terhadap hal-hal yang perlu untuk melaksanakan kemerdekaan.

Pada waktu itu secara resmi Pemerintah Jepang belum mempergunakan istilah Indonesia, tetapi Hindia Timur sebagai terjemahan dari “To Indo”. Dan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tergantung kepada tercapainya kemenangan akhir di pihak Jepang, terlepas dari penjelasan tadi, janji kemerdekaan disambut oleh bangsa Indonesia dengan gembira. Karena hal itu dianggap pembuka pintu bagi tercapainya cita-cita kemerdekaan, lagu Indonesia Raya berkumandang di mana-mana, Sang Merah Putih dikibarkan di samping bendera Hinomaru.

Janji Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia di kemudian hari yang tidak menyebutkan kapan waktunya itu, ditambah dengan penjelasan tambahan bahwa kemerdekaan itu baru diberikan bila perang berakhir dengan kemenangan Jepang. Hal tersebut menunjukkan siasat Jepang untuk menarik perhatian bangsa Indonesia supaya lebih bersimpati kepada Jepang, sementara itu pada tanggal 1 Maret 1945, *Saiko Syikikan* mengumumkan pembentukan “Dokuritsu Zyumbi Tyosakai” yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Tujuan politik dan pembentukan badan tersebut ialah agar rakyat Indonesia tetap memberikan dukungan kepada Jepang, sekalipun kedudukan militer Jepang di front Pasifik sudah goyah.

Tugas BPUPKI ialah mempelajari soal-soal yang berhubungan dengan segi pemerintahan, ekonomi dan tata pemerintahan yang

diperlukan dalam usaha pembentukan Indonesia “kelak kemudian hari”. Badan tersebut, diresmikan tanggal 28 Mei 1945, yang diselenggarakan di bekas gedung Volksraad (Gedung Pancasila, sekarang ini) dengan dihadiri oleh Jenderal Itakagi dan Letnan Jenderal Nagano. Dalam upacara tersebut diadakan suatu upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih yang dilakukan oleh Toyohiko Masuda dan pengibaran bendera oleh AG. Pringgodigdo.

Dalam upacara pelantikan anggota BPUPKI itu, dibacakan amanat dari Saiko Syikikan, isinya yaitu : (*Lembaga Soekarno Hatta, 1984 : 28-29*).

“Kemerdekaan Indonesia adalah suatu bukti yang nyata tentang tujuan perang suci sekarang ini, yang timbul memang berdasarkan cita-cita yang gemilang dan diciptakan sejak berdirinya negara “Dai Nippon”. Akan tetapi, usaha untuk mendirikan negara merdeka yang baru bukanlah usaha mudah. Lebih lagi jika tidak dengan jalan mempelajari; menyelidiki dan merencanakan dengan seksama dan teliti, segala usaha untuk menegakkan kekuatan pembelaan, dan soal-soal yang menjadi dasar negara. Maka sudah barang tentu, bahwa pekerjaan mulia dalam pembentukan “Negara Merdeka” di kemudian hari, atau akan mempunyai pokok dasar yang kokoh dan teguh. Pada kali ini, bertempat di ruangan ini, mulai dilakukan langkah pertama dalam pekerjaan “Dokuritsu Zyumbi Tyosakai”. Untuk menyelidiki serta melaksanakan dasar usaha itu dengan sedalam-dalamnya dan seteliti-telitinya. Berhubung dengan itu, maka saya mempunyai penghargaan besar pada badan ini dan tuan-tuan “Qiin” hendaklah menginsafkan dalam hati sanubari tuan-tuan, betapa pentingnya dan besarnya kewajiban tuan-tuan untuk menyelesaikan usaha yang mulia itu, sehingga tercatatlah peristiwa yang cemerlang ini dalam riwayat pembentukan negara “Indonesia Merdeka”.

*Jakarta, tanggal 28 bulan 5
Tahun Syoowa, 20 (2605)
Saiko Syikikan.*

Anggota BPUPKI terdiri dari 62 orang bangsa Indonesia termasuk 4 orang dari golongan keturunan Cina, Arab, dan Belanda, ditambah 7 orang istimewa bangsa Jepang. Badan ini diketuai oleh Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat dibantu dua wakil ketua yaitu seorang Jepang bernama Yoshido Ichibangase dan R.P. Soeroso.

Sidang pertama BPUPKI dimulai tanggal 29 Mei 1945 dan berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini telah berhasil mencetuskan Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Selain itu, pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno, selaku anggota BPUPKI seperti yang dirumuskan Jepang dengan menyatakan bahwa “Kalau benar semua ini harus diselesaikan lebih dahulu, sampai *njlimet*, maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, kita semua tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, sampai di lubang kubur”.

Menanggapi pidato 1 Juni 1945, Yoshido Ichibangase, dalam laporannya yang disimpan dalam salah satu arsip resmi di Amsterdam, menulis bahwa “Mayoritas kaum nasional menuntut kemerdekaan sekarang, sekalipun persiapan belum sempurna, kata Ir. Soekarno kemerdekaan ialah ibarat jembatan, setelah itu kita sempurnakan masyarakat kita, saya mendapat kesan, bahwa Ir. Soekarno akan memutuskan hubungan dengan Jepang apabila Jepang tidak segera memberikan kemerdekaan pada Indonesia”. (*Departemen Luar Negeri: 1980 : 30*).

Dalam sidang yang kedua yang diadakan dari tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945 telah menghasilkan Hukum Dasar atau Undang-undang Dasar Negara Indonesia Merdeka. Di samping itu telah berhasil memecahkan masalah sehingga tercapai suatu persetujuan dalam Naskah Rancangan Pembukaan Hukum Dasar (kelak terkenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”), terumuskannya Naskah pernyataan Indonesia Merdeka, Naskah Pembukaan Undang-undang Dasar termasuk di dalamnya dasar negara serta naskah UUD, maka tugas BPUPKI dianggap telah selesai.

Sementara itu pada tanggal 16 Juli 1945, Kepala Staf Tentara Umum Selatan, juga tentara keenam belas dan tentara kedua puluh lima diberi instruksi dari Tokyo mengenai keputusan Dewan Perang Tertinggi tentang kemerdekaan Indonesia. Instruksi tersebut, yaitu agar penguasa militer di Indonesia mempercepat persiapan kemerdekaan. Selain itu Jenderal Terauchi pada tanggal 2 Agustus 1945, mengirim telegram kepada Menteri Muda Angkatan Darat, dan tembusannya kepada “oka” (kode bagi tentara Garnisun di Kalimantan), “Tomi” (Tentara Kedua puluh lima di Sumatera), dan kepada Armada Ekspedisi Selatan kedua. Isi telegram itu adalah sebagai berikut :

1. Harus dikeluarkan pengumuman (Pada awal bulan Agustus boleh jadi pada tengah hari tanggal 7 Agustus) yang berisi: Panitia Persiapan Kemerdekaan untuk Hindia Timur akan didirikan, sedangkan pada pertengahan Agustus pembentukan Panitia itu harus dilaksanakan.
2. Tanggal kemerdekaan direncanakan pada awal September (7 September). Tetapi pengumuman mengenai waktu yang setepatnya akan dikeluarkan pada saat yang langsung menjelang kemerdekaan.

Selanjutnya dalam telegram itu, Terauchi mengatakan bahwa “Untuk waktu sekarang kemaharajaan akan memberi bimbingan yang positif untuk kemerdekaan pihak ketiga”. (*HJ. Benda, et-al, 1965 : 275-279*).

Akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sesuai dengan telegram Jenderal Terauchi tersebut. PPKI beranggotakan 21 orang yang terdiri dari beberapa tokoh pergerakan dan suku di Indonesia, sebagai ketuanya ditunjuk Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta wakil ketua. Untuk pengangkatan itu Jenderal Terauchi memanggil Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan K.R.T Radjiman Wedyodiningrat menghadap kepadanya. Pada tanggal 9 Agustus 1945 ketiga tokoh Indonesia itu berangkat menuju markas Besar Jenderal Terauchi di Dalath, Vietnam Selatan. Perjalanan mereka ke Dalath disertai Pejabat *Gunseikanbu*, yaitu Kolonel Nomura dan Mijoshi.

Dalam suatu pertemuan di sana Jenderal Terauchi menyatakan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya, telah dibentuk PPKI, dan pelaksanaannya terserah kepada saudara-saudara sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Perkataan itu ditujukan kepada Ir. Soekarno dan Drs. Hatta. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, sekalipun pelaksanaannya mungkin tidak dapat sekaligus, melainkan bagian demi bagian sesuai dengan kondisi setempat. (*Moh. Hatta; 1983: 18-19*).

Perubahan politik Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia dimungkinkan karena Sekutu telah mengeluarkan "Deklarasi Postdam" pada tanggal 26 Juli 1945, yang memberikan pilihan kepada Jepang, yaitu:

"Kami memerintahkan kepada pemerintah Jepang untuk mengumumkan penyerahan tidak bersyarat kepada semua angkatan perangnya, dan menjalankan perintah-perintah, patuh dalam segala tindakan. Penolakan terhadap perintah ini, berarti mengakibatkan kehancuran total bagi Jepang". (*Achmad Soebardjo, 1978 : 293-294*).

Selain itu Jepang pun menghadapi Rusia dengan menyatakan perang terbuka yaitu dengan cara melakukan penyerbuan ke Manchuria. Keadaan itu ditambah lagi dengan jatuhnya bom atom Amerika di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Sedangkan pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom Amerika dijatuhkan di Nagasaki, yang mengakibatkan kehancuran kota dan merenggut ribuan jiwa manusia. Dengan demikian, dapat diduga bahwa kekalahan Jepang akan terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga proklamasi Indonesia harus segera dilaksanakan.

Pada tanggal 13 Agustus 1945 rombongan Soekarno meninggalkan Dalath, menuju Jakarta. Akan tetapi sebelumnya singgah di Singapura. Mereka bertemu dengan anggota PPKI dari Sumatera, yaitu Mr. Teukoe Moehammad Hasan, Dr. Amir dan Mr. Abbas. Dalam pertemuan ini, mereka bertukar pikiran mengenai perkembangan akhir peperangan Jepang.

Pada tanggal 14 Agustus 1945, ketiga tokoh Indonesia itu tiba kembali di Jakarta, Ir. Soekarno mengumumkan di depan orang banyak yang menjemputnya, bahwa “Kalau dulu saya berkata sebelum jagung berbuah, Indonesia akan merdeka, sekarang saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga”. Pertimbangannya ialah bahwa PPKI akan segera dapat menyelesaikan soal-soal yang perlu untuk kemerdekaan, terutama UUD yang rancangannya sudah ada sebagai hasil rancangan BPUPKI.

Sekitar pukul 14.00 ketika Hatta tiba di rumah, Sutan Sjahrir telah menunggu. Maksud kedatangan Sutan Sjahrir yaitu menyampaikan berita kekalahan Jepang yang didengarnya dan siaran radio luar negeri. Drs. Hatta sempat kaget dan mengatakan bahwa kemerdekaan semata-mata di tangan kita, hanya penyelenggaraannya diserahkan kepada PPKI. Hal ini sesuai dengan ucapan Jenderal Terauchi di Dalath.

Sutan Sjahrir berpendapat, apabila pernyataan kemerdekaan dilakukan oleh PPKI, maka Sekutu akan menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia adalah buatan Jepang. Untuk itu disarankan agar Ir. Soekarno sendiri yang menyatakan kemerdekaan Indonesia atas nama Pemimpin rakyat, dengan perantaraan corong radio. Drs. Moh. Hatta sependapat dengan Sutan Sjahrir mengenai proklamasi kemerdekaan secepat-lekasnya. Akan tetapi tidak yakin bahwa Soekarno mau mengambil langkah bertindak sendiri mengumumkan proklamasi.

Setelah pembicaraan itu, Drs. Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir menuju rumah Ir. Soekarno. Pembicaraan mengenai kemerdekaan Indonesia tentang kekalahan Jepang, diungkapkan Sutan Sjahrir kepada Ir. Soekarno. Akan tetapi seperti yang dipikirkan Drs. Moh. Hatta, bahwa Ir. Soekarno tidak bersedia menyatakan proklamasi Indonesia sendiri, beliau mengatakan :

“Saya tidak berhak bertindak sendiri, hak itu adalah hak dan tugas Panitia Persiapan Kemerdekaan, yang saya menjadi ketuanya. Alangkah janggalnya di mata orang, setelah kesempatan terbuka untuk mengucapkan Kemerdekaan Indonesia, saya bertindak sendiri melewati Panitia.

Kemerdekaan Indonesia yang saya ketuai". (*Moh. Hatta, 1982 : 436442*).

Pada waktu itu Ir. Soekarno tidak mengetahui bahwa justru pada saat-saat itu malapetaka telah menimpa Jepang. Hiroshima dan Nagasaki mengalami pemboman, bom atom dari pihak Sekutu. Dengan demikian maka sampailah puncak kegentingan perang Asia Timur Raya yang dibangga-banggakan Jepang sebagai "Perang Sucinya" itu pada tanggal 14 Agustus 1945, itu pula yang menyebabkan Kaisar Hirohito terpaksa memerintahkan kepada seluruh tentaranya untuk menyerah tanpa syarat. Namun berita ini rupanya untuk daerah pendudukan Jepang sengaja diperlambat penyiarannya, sehingga pada waktu itu kota Jakarta diliputi oleh suasana tanda tanya, desas-desus menyerahnya Jepang hanya tersebar dari mulut ke mulut.

Nyatanya pada saat itu di Indonesia terjadi kekosongan pemerintahan, Jepang sudah jatuh, sedangkan Sekutu belum tiba. Beruntunglah bahwa kesempatan "Vacuum of Power" itu dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia.

B. Peranan Golongan Pemuda Dalam Menuju Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Adanya perhatian pemerintah pendudukan Jepang terhadap pemuda Indonesia merupakan kesempatan baik bagi golongan pemuda untuk turut serta mempersiapkan diri untuk berjuang menuju kemerdekaan. Hal ini dikarenakan Gerakan Tiga A yang dibentuk Jepang untuk kepentingannya, ternyata mempunyai tujuan bahwa bangsa Indonesia ingin mengusir penjajah.

Golongan pemuda dalam Gerakan Tiga A, dihimpun pada "Barisan Pemuda Asia Raya". Sedangkan pemuda-pemuda di pedesaan mendirikan badan yang dinamakan *Keibodan*.

Ketika pada tanggal 3 Oktober 1943, didirikan PETA, maka berbondong-bondonglah pemuda Indonesia mendaftarkan diri kedalamnya menjadi anggota PETA, merupakan suatu kebanggaan

dan mereka memang merasa menjadi pembela tanah air dan bangsa. Sehingga tidak mengherankan bila kemudian terjadi pemberontakan terhadap Jepang yang kala itu menjadi penguasa.

Sikap Jepang yang rakus guna menunjang keperluan perang tanpa memperhitungkan penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh tindakannya itu, menimbulkan kemarahan tentara PETA di Blitar, pada tanggal 14 Februari 1945 meletuslah perlawanan tentara PETA Blitar kepada Jepang. Pimpinan terkenal dari tentara PETA Blitar itu ialah Supriadi. Tujuan perlawanan itu tampak dari kata-kata Supriadi sebagai berikut: "Jangan sampai negeri kita didominionkan jangan sampai kemerdekaan itu dihadiahkan, tetapi harus kita rebut sendiri dengan kekuatan senjata". (*Nugroho N, 1969 : 28*).

Pada hakekatnya segenap barisan pemuda itu disiapkan untuk menyongsong kemerdekaan Indonesia, dan sama sekali tidak untuk memenuhi kehendak dan niatan pihak Jepang untuk membantu perangnya melawan Sekutu.

Di samping kegiatan pemuda yang tampak nyata di depan umum, terdapat juga kelompok pemuda yang bekerja secara diam-diam atau secara *illegal*. Salah satunya adalah asrama Angkatan Baru Indonesia, di Menteng 31 (Sekarang Gedung Juang 45) yang dipimpin oleh Sukarni dan Chairul Saleh. Beberapa pimpinan Indonesia seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Amir Sjarifuddin, Moh. Yamin, Mr. Subardjo dan lain-lain memberikan kursus politik di Asrama tersebut.

Rasa kebangsaan bertambah tertanam dalam dada para pemuda, dan setelah Jepang memberikan janji-janji barunya tentang kemerdekaan Indonesia, di Bandung berhimpunlah sejumlah pemuda yang dengan tegas menghendaki "Indonesia Merdeka sekarang juga". Dalam pertemuan yang diadakan tanggal 16 Mei 1945 di Villa Isola, Bandung (sekarang Kampus UPI), antara lain membahas tentang bentuk negara Indonesia yang akan merdeka nanti, yaitu republik berdasarkan kedaulatan rakyat dan untuk seluruh kepulauan Indonesia. Diantara pemuda yang hadir dalam pembicaraan itu ialah SK Trimurti, Chairul Saleh, Pandu Kartawiguna, Adam Malik, BM. Diah, Sukarni dan lain-lain.

Penyelenggaraan pertemuan itu diprakarsai oleh Angkatan Moeda Indonesia. Adapun Angkatan Moeda Indonesia, dimungkinkan dibentuk atas inisiatif Jepang pada pertengahan tahun 1944. Akan tetapi lama kelamaan organisasi pemuda itu menjadi suatu gerakan pemuda yang anti Jepang.

Pertemuan itu berada dalam suasana militan dan nasionalistis. Sehingga lagu yang dinyanyikan hanya Indonesia Raya, dan bendera yang dikibarkan hanya bendera Merah Putih. Setelah tiga hari lamanya kongres, dicapai dua resolusi, yaitu : (*Asia Raya, 24 Mei 1945*)

1. Semua golongan Indonesia; terutama golongan pemuda dipersatukan dan dibulatkan di bawah satu pimpinan nasional.
2. Dipercepatnya pelaksanaan kemerdekaan Indonesia.

Akan tetapi resolusi itu tidak memuaskan beberapa tokoh pemuda yang terutama utusan dari Jakarta, mereka bertekad untuk tidak mengambil bagian dalam gerakan Angkatan Moeda Indonesia. Untuk itu mereka bermaksud menyiapkan suatu gerakan pemuda yang lebih radikal.

Untuk itu pada tanggal 3 Juni 1945 di Jakarta diadakan pertemuan para pemuda secara rahasia bertempat di gedung *Djawa Hokokai* cabang kota Jakarta, di Gambir Selatan (sekarang jalan Merdeka Selatan). Pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 100 orang pemuda yang mewakili masing-masing perkumpulannya. Akhirnya terbentuklah organisasi pemuda yang dinamakan "Angkatan Baru Indonesia", diketuai oleh BM. Diah. Angkatan Baru Indonesia merupakan gabungan dari perkumpulan pemuda yang hadir dalam pertemuan itu, dengan tujuan "Memperjuangkan Indonesia merdeka, sekarang juga atas kesanggupan dan kekuatan sendiri, dan bahkan siapa saja yang berani merintang perjuangan ini adalah penghalang dan penghianat, yang telah dipahami sepenuhnya oleh rakyat". Untuk merencanakan Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja, serta menyusun rencana perjuangan pemuda, dan kemudian mengadakan permusyawaratan besar "Angkatan Baru Indonesia", hadirin menunjuk panitia yang diketuai oleh BM. Diah, dengan anggotanya yaitu : Sukarni, Sudiro, Sjarif Thayeb, Harsono

Tjokroaminoto, Wikana, Chairul Saleh, Gultom, Supeno dan Asmara Hadi.

Keputusan mengenai dasar dan tujuan gerakan tersebut, diambil pada tanggal 15 Juni 1945, antara lain menetapkan gerakan ini bernama “Gerakan Angkatan Baru Indonesia”, didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1945. Sedangkan tujuannya agar dapat mempersiapkan dan menyediakan tenaga “Angkatan Baru Indonesia” untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat dan juga memberikan pendidikan, petunjuk, pimpinan dan pengorbanan kepada rakyat untuk melaksanakan cita-citanya”. Markas mereka, ada di jalan Menteng Raya 31, Jakarta. (*Sudiro, 1972 : 11-16 dan wawancara dengan BM. Diah tanggal 13 Juli 1990*).

Rasa kebangsaan tersebut tidak hanya terdapat di kalangan pemuda seperti tersebut di atas saja, tetapi juga para pelajar mahasiswa yang masih ada di Asrama perguruan masing-masing. Misalnya Asrama *Ika Dai Gaku* (Perguruan Tinggi Kedokteran) telah mengadakan perlawanan menentang sistim Jepang yang *fascistis* itu. Markas mereka ada di Jalan Prapatan 10, Jakarta.

Pada waktu menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, kalangan pemuda yang berjuang secara *illegal* itu telah mendengar terlebih dahulu berita kekalahan Jepang kepada Sekutu, pada tanggal 14 Agustus 1945, berita kekalahan Jepang itu mendapat sambutan dari pemuda pejuang dengan mendesak Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta selaku pimpinan bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan pihak Jepang. Hal ini pula yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok.

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa perjuangan bangsa Indonesia di masa pendudukan Jepang pun tetap bertujuan untuk mencapai kemerdekaan, sekalipun kemerdekaan telah dijanjikan Jepang. Semangat untuk meraih kemerdekaan dengan usaha sendiri tidak menjadi pudar, hal ini menunjukkan eratnya kaitan antara perjuangan bangsa dengan Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi.

BAB III

SEKITAR PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

A. Peristiwa Menjelang Proklamasi

Berita kekalahan Jepang dengan tidak bersyarat kepada pihak Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, selalu ditutupi oleh pemerintah militer Jepang, akan tetapi kalangan pemuda yang berjuang secara *illegal* mendengar berita ini lewat radio siaran luar negeri yang didengar secara sembunyi-sembunyi.

Pada hari itu juga yaitu tanggal 14 Agustus 1945 waktu sore hari, Sutan Sjahrir yang telah mendengar berita kekalahan Jepang, memberi tahu Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, serta mendesak agar segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia dan menjamin bahwa kemerdekaan akan didukung oleh gerakan pemuda revolusioner serta kesatuan PETA. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta menyangsikan berita tersebut karena beliau baru tiba dari Dalath menghadap Jenderal Terauchi. Di samping itu kedua pimpinan nasional itu menyangsikan kemampuan pemuda revolusioner untuk mengalahkan Jepang, serta mengkhawatirkan akan terjadinya pertumpahan darah yang sia-sia. Sikap kedua tokoh tersebut dapat dimaklumi, karena mereka telah berpengalaman, sehingga sangat berhati-hati dalam bertindak dan berusaha tidak mengorbankan bangsanya secara emosi.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Subardjo mengunjungi pejabat Jepang untuk menanyakan ketegasan berita situasi perang, ternyata *Gunseikan* dan pejabat lainnya sedang rapat di Markas Besar Angkatan Perang Jepang. Selanjutnya atas usul Mr. Soebardjo, rombongan itu mencoba memperoleh informasi tentang situasi perang yang sebenarnya ke kantor Laksamana Maeda. Barulah di tempat itu ketiga tokoh nasional tersebut memperoleh berita. Menurut Maeda dengan air muka yang sedih menyampaikan berita kekalahan Jepang yang disiarkan radio itu memang berasal dari Sekutu, tetapi berita langsung dari Tokyo belum ada. Setelah mendapat penjelasan

demikian, ketiga tokoh tersebut berinisiatif untuk mengadakan rapat dengan seluruh anggota PPKI. Drs. Moh. Hatta selaku wakil kepala biro PPKI menginstruksikan kepada wakil ketuanya Mr. Soebardjo agar mengundang semua anggota PPKI yang telah lengkap dan saat itu menginap di Hotel Des Indes untuk datang ke kantor *Dewan Sanyo Kaigi* di Pejambon pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 10.00 pagi.

Pada saat yang sama tanggal 15 Agustus 1945, Sutan Sjahrir dan kelompoknya telah melakukan aksi penyebaran selebaran yang menyatakan anti Jepang serta mengorganisir pemuda pelajar diberbagai kota di Jawa untuk mengambil alih kekuasaan. Aksi golongan pemuda tidak hanya sampai disitu. Pada sore harinya golongan pemuda menjemput anggota PPKI yang saat itu menginap di Hotel Des Indes untuk dibawa ke Asrama Prapatan 10, rencananya anggota PPKI pada sore itu akan mengadakan pertemuan non formal dengan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Akan tetapi gagal karena golongan pemuda memaksa mereka untuk turut serta. Anggota PPKI itu dipaksa mendengarkan ceramah dari Sutan Sjahrir. Isi ceramahnya tentang kekalahan Jepang yang didasarkan pada siaran radio luar negeri, karena itu Ia berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia tidak perlu diterima sebagai hadiah dari Jepang dan kemerdekaan itu harus dibentuk sendiri oleh bangsa Indonesia serta diproklamasikan ke seluruh dunia. Selesai pertemuan itu anggota PPKI tidak diizinkan meninggalkan tempat, mereka ditawan sementara. Jauh malam barulah mereka diantar kembali ke Hotel Des Indes.

Di tempat lain pada saat yang sama tanggal 15 Agustus 1945, kelompok pemuda revolusioner sekitar pukul 20.00 mengadakan rapat, bertempat di ruang belakang gedung Bakteriologi Laboratorium Pegangsaan Timur 16 (sekarang FKUI bagian Mikrobiologi dan Ilmu Kedokteran Komunitas) dengan tujuan meninjau keadaan kritis dan mencari kemungkinan untuk memperoleh manfaat dan kesempatan yang istimewa itu. Rapat memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sendiri, tanpa campur tangan asing. Selanjutnya Wikana dan Darwis ditugaskan untuk menyampaikan keputusan rapat golongan pemuda revolusioner kepada Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.

Pukul 22.00 utusan diterima Ir. Soekarno dirumahnya di Pegangsaan Timur 56 (sekarang Gedung Pola). Jawaban Soekarno ialah bahwa penyerahan secara resmi belum ada, kemerdekaan Indonesia pasti akan tercapai, tinggal soal waktu saja. Ketika pembicaraan berlangsung, datanglah Drs. Moh. Hatta, Mr. Soebardjo, Dr. Boentaran, Dr. Sanusi dan Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Drs. Moh. Hatta menyambung pembicaraan Ir. Soekarno, bahwa kita harus menunggu berita resmi tentang menyerahnya Jepang. Para utusan kecewa, Wikana berkata bahwa bila Ir. Soekarno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam itu juga, akan mengakibatkan terjadinya pertempuran besar-besaran pada esok hari. Ir. Soekarno naik darah, Ia berdiri dan menghampiri Wikana, kemudian memuntahkan kata-kata “ini batang leherku, seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga, tidak usah menunggu sampai esok”. Wikana mundur, suasana hening seketika waktu itu, jam telah menunjukkan larut malam. Beberapa menit setelah itu, pertemuan bubar. Wikana dan Darwis menuju Cikini 71, untuk memberikan laporan kepada forum rapat pemuda revolusioner yang sedang dilanjutkan di sana.

Rapat tersebut dihadiri pula oleh kelompok Soekarni, dan PETA. Rapat memutuskan malam itu harus mengungsikan Ir. Soekarno dari Drs. Moh. Hatta, dengan maksud menjauhkan dan mengamankan dan segala pengaruh dan siasat Jepang. Pada waktu rapat berlangsung Sutan Sjahrir tidak ikut sehingga tengah malam ia dibangunkan oleh Soebadio dan diberi tahu tentang putusan rapat yaitu mengamankan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Mendengar putusan rapat itu Sutan Sjahrir terkejut karena ia tidak menyetujui rencana demikian, kendati begitu beliau tidak dapat berbuat apa-apa karena rencana tersebut adalah keputusan rapat. Akhirnya Sutan Sjahrir dan pemuda revolusioner yang tertinggal di Jakarta mempersiapkan keperluan untuk proklamasi.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30, Ir. Soekarno beserta Keluarga dan Drs. Moh. Hatta dibawa oleh golongan pemuda ke Rengasdengklok (Markas PETA) yaitu sebuah kecamatan di daerah Kerawang. Alasan golongan pemuda yaitu bahwa semangat rakyat sudah meluap sehingga keamanan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta

terancam apabila terjadi *clash* antara rakyat dengan pendudukan militer Jepang.

Pada mulanya pertahanan PETA yang didirikan Jepang di Rengasdengklok ditujukan untuk menahan masuknya pasukan Sekutu ke wilayah Jawa Barat. Akan tetapi lama kelamaan menjadi alat perjuangan bangsa Indonesia karena daerah Rengasdengklok dikuasai penuh oleh PETA. Markas PETA di Rengasdengklok, terdiri dari :

3 Asrama,

1 Gudang Peluru,

1 Ruang Kesehatan,

1 Ruang Peribadatan,

1 Dapur Umum,

2 Ruang untuk “Cudanco” dan “Sidokan” yang terletak paling depan. Markas PETA berdiri di atas tanah 100 m², di Kampung Bojong (Sekarang disebut Bojong Gudang dan Bojong Tugu). Sedangkan di sekitar Markas terdapat beberapa pos penjagaan.

Persiapan pengamanan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan keamanan di Rengasdengklok maupun daerah sekitarnya. Untuk itu setiap orang yang akan masuk ke wilayah Rengasdengklok, diperiksa di tiap pos penjagaan. Selain itu, pada tanggal 15 Agustus 1945 diadakan pertemuan antara beberapa pimpinan Barisan Pelopor Rengasdengklok dengan PETA membicarakan tentang akan kedatangan tamu-tamu pembesar dari Jakarta. Akhirnya disepakati keputusan, untuk dapat menjamin keselamatan tamu-tamu itu. Untuk itu mereka dilarang memberitahu siapapun mengenai kedatangan tamu dari Jakarta. Sanksi membocorkan rahasia tersebut, adalah dibunuh. Sehingga tidak semua rakyat Rengasdengklok mengetahuinya.

Pada tanggal 16 Agustus 1945, sebelum rombongan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta tiba di Rengasdengklok, diadakan upacara Pengibaran “Sang Merah Putih”, yang didahului dengan penurunan bendera

“Hinomaru”. Upacara itu dipimpin oleh “Shodanco” Umar Baskan dan “Shodanco” Mohammad Arfan. Menurut Dulhammad, “Sang Merah Putih” dikibarkan di atas pohon kelapa. (Sekarang Tugu 17 Agustus 1945 Rengasdengklok). Setelah itu pengibaran Bendera Merah Putih dikibarkan pula di depan Kewedanaan. Dengan berkibarnya Bendera Merah Putih di Rengasdengklok, maka rakyat Rengasdengklok menyatakan telah lepas dari belenggu tentara Jepang. Dengan demikian rakyat Rengasdengklok bersukacita dengan berteriak “Merdeka, Merdeka”.

Pemerintah Jepang di Rengasdengklok diambil alih oleh rakyat, sedangkan orang Jepang banyak yang ditangkap dan di jadikan tawanan perang. (Sudiyo, 1983:22-24).

Rombongan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dibawa dari Jakarta dengan menggunakan dua buah mobil, sebuah sedan yang disupiri oleh Winoto Danuasmoro, membawa Ir. Soekarno sekeluarga (Ibu Fatmawati dan Guntur). Sedangkan mobil lainnya, membawa Drs. Moh. Hatta, Soekarni, Yusuf Kunto. Di samping itu, ada mobil lain berisi beberapa anggota PETA yang dipimpin oleh Shodanco Singgih bertugas mengawal rombongan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sampai Rengasdengklok.

Ketika rombongan sampai di persimpangan “Antara Kerawang dan Rengasdengklok, rombongan dipindahkan pada mobil pick-up. Sedangkan mobil yang dibawa Winoto Danuasoro kembali lagi ke Jakarta. Rombongan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tiba di asrama PETA Rengasdengklok pukul 07.00. Kedatangan mereka disambut gembira oleh seluruh prajurit PETA. Hanya beberapa orang saja pasukan rakyat yang mengetahui peristiwa itu.

Oleh karena asrama PETA dirasakan kurang cocok untuk peristirahatan rombongan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, maka oleh PETA ditempatkan di rumah tuan tanah Tionghoa yang bernama Djiaw Kie Siong. Sebelumnya hampir terjadi insiden antara PETA dengan keluarga Djiaw Kie Siong, karena mereka tidak mau mengosongkan rumahnya. Hal tersebut, disebabkan mereka tidak tahu bahwa rumahnya akan digunakan tempat peristirahatan rombongan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.

Setelah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta beristirahat beberapa menit, mereka didatangi Soekarni, Yusuf Kunto, Chaerul Saleh, Soetjipto dan Umar Baksan. Menurut Ahmad Ginun (Bekas Kepala Pasukan Gerilya Rengasdengklok, sekarang telah meninggal dunia), dalam "catatannya" ditulis, bahwa Soekarni yang pertama angkat bicara. Pembicaraan Soekarni yang diutarakan kepada Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, adalah menjelaskan maksud mereka mengamankan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Selain itu, mereka mendesak agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta segera menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia. Soekarni mengatakan bahwa hal itu mengingat keadaan sudah mendesak dan suasana perjuangan kian memuncak. Untuk itu jika proklamasi tidak dilakukan secepatnya, maka pemberontakan akan terjadi. Selain itu segala akibatnya terutama yang menyangkut keselamatan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, tidak akan dipertanggungjawabkan lagi oleh seluruh rakyat Indonesia. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak memberi jawaban, mereka nampak terharu dengan segala pembicaraan yang disampaikan oleh Sukarni. (*Harian Terbit, 6 Agustus 1985*).

Drs. Moh. Hatta dalam bukunya menulis tentang peristiwa di Rengasdengklok, bahwa ia tidak mengerjakan apa-apa kecuali bermain-main dengan Guntur.

Hilangnya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta baru diketahui oleh Mr. Soebardjo pukul 08.00 pagi, setelah Soediro sekretaris pribadinya melaporkan kejadian tersebut di rumah beliau di jalan Cikini Raya 82. Adanya laporan tersebut, segera ditanggapi oleh Mr. Soebardjo dengan secepatnya menghubungi lewat telepon Markas Besar Angkatan Laut Jepang dan meminta bicara dengan Nishijima, untuk memberitahukan peristiwa hilangnya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.

Setelah itu Mr. Soebardjo secara pribadi menemui Maeda di kediamannya jalan Imam Bonjol No.1. Maeda sangat terkejut mendengar berita itu dan beliau berjanji akan membantu serta memerintahkan Nishijima untuk mencari Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.

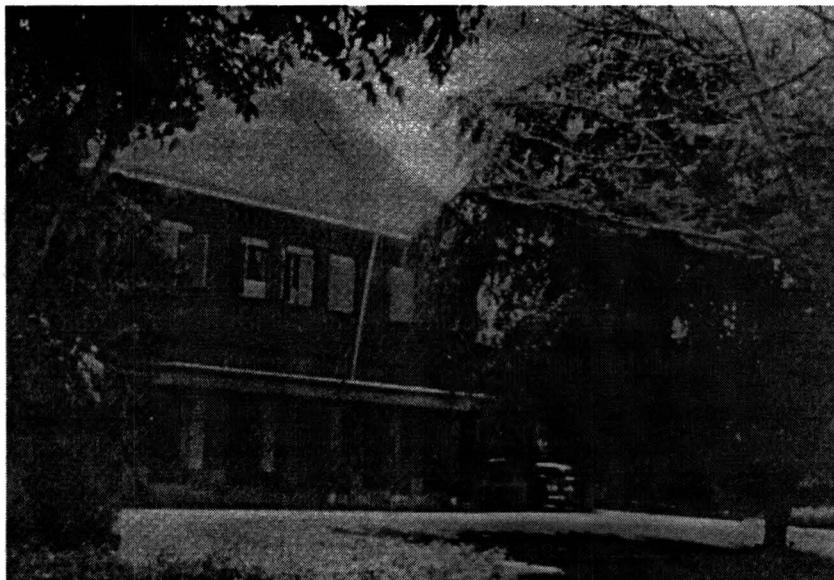
Sepulang dari rumah Maeda, Mr. Soebardjo menuju kantornya di Prapatan Gambir 59 dan memanggil Wikana untuk menanyakan kemana Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, ketika pembicaraan berlangsung Nishijima datang yang kemudian menegaskan kepada Wikana, bahwa Laksamana Maeda akan mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak lama kemudian Yusuf Kunto datang ke tempat itu. Dengan kedatangan Yusuf Kunto itu maka Mr. Soebardjo berusaha membujuk dengan bersungguh-sungguh agar segera mengembalikan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, serta memberikan jaminan bahwa apabila pelaksanaan proklamasi mendapat kesulitan dengan Angkatan Darat maka Maeda telah memberikan dukungannya. Akhirnya kedua pemuda revolusioner tersebut mau menunjukkan tempat Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta berada.

Pukul 16.00 Mr. Soebardjo, Soediro (Mbah) dan Yusuf Kunto, dengan mengendarai mobil Skoda milik Mr. Soebardjo yang dikendarai oleh supirnya berangkat menuju Rengasdengklok. Ternyata yang diamankan oleh golongan pemuda di Rengasdengklok bukan hanya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta saja. Ada Residen Soetarjo Kartohadikoesoemo yang kabarnya ditawan oleh golongan pemuda sewaktu memeriksa persediaan beras di Rengasdengklok. Kedatangan rombongan Mr. Soebardjo pada mulanya ditolak oleh Soekarno dan lain-lain karena Mr. Soebardjo menerangkan bahwa ia datang atas nama *Kaigun*. Jawaban itu menimbulkan insiden pembicaraan, hampir saja Mr. Soebardjo dan Soediro (Mbah) dimasukkan dalam penjara.

Mr. Soebardjo kemudian menerangkan bahwa kedatangannya diutus oleh Wikana cs, yang sudah diatur untuk menyiapkan proklamasi yang ditunda sementara sampai jam 11.00 malam serta menerangkan bahwa adanya penyerahan resmi dari Jepang kepada Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, yang harus dilaksanakan di Jakarta. Pada mulanya para pemuda keberatan, tetapi akhirnya setuju setelah Mr. Soebardjo mengatakan akan menjamin keamanan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta di Jakarta di rumah Maeda. Di samping itu Mr. Soebardjo memberi jaminan, kalau proklamasi itu tidak dilakukan, ia bersedia ditembak mati.

Selanjutnya rombongan segera menuju Jakarta dan tiba waktu malam hari di rumah kediaman Ir. Soekarno. Setelah ada persetujuan di antara mereka untuk beristirahat dulu di rumah masing-masing, maka Ir. Soekarno, Ibu Fatmawati dan Guntur masuk ke rumah kediamannya. Rombongan segera melanjutkan perjalanan ke rumah Drs. Moh. Hatta (sekarang jalan Diponegoro No.57), setibanya di sana Drs. Moh.Hatta segera turun dan disusul oleh Soekarno dan Mr. Soebardjo. Soekarno menukar pakaian PETA-nya dengan pakaian biasa yang dipinjam dari Drs. Moh. Hatta. Sedangkan Mr. Soebardjo meminjam telepon untuk menghubungi Hotel Des Indes agar disediakan ruangan rapat. Akan tetapi pihak hotel tidak bersedia memenuhi permintaan itu karena adanya larangan bahwa jam malam pukul 22.00 tidak boleh ada kegiatan.

Jawaban dari pihak hotel tidak menjadikan Mr. Soebardjo putus asa, maka ia mencoba menghubungi Laksamana Muda Tadashi Maeda agar dapat meminjamkan ruangan kediamannya untuk rapat mempersiapkan proklamasi, Maeda bersedia dengan senang hati. Setelah mendapat jawaban tersebut Mr. Soebardjo kembali menghubungi hotel Des Indes untuk mengundang anggota PPKI yang menginap di sana, agar segera datang ke rumah kediaman Maeda pada pukul 00.00. Sedangkan Soekarno setelah mengetahui keputusan itu, segera minta diri dan mengadakan kontak dengan golongan pemuda yang berada di Prapatan 10 dan Cikini 71, serta memberitahukan bahwa malam itu akan diadakan rapat untuk persiapan proklamasi. Rumah kediaman Laksamana Maeda, tempat merumuskan dan mengesahkan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.



Rumah kediaman Laksamana Maeda, tempat merumuskan dan mengesahkan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

B. Proses Perumusan Naskah Proklamasi

Pada tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 22.00 Ir. Soekarno yang telah beristirahat sejenak di rumah kediaman tiba di rumah kediaman Drs. Moh. Hatta. Akhirnya Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Soebardjo dan Soediro (Mbah) bersama-sama menuju rumah kediaman Maeda.

Setibanya di rumah kediaman Maeda, rombongan ini diterima dengan gembira. Setelah saling memberi hormat lalu Ir. Soekarno mengucapkan terima kasih atas kesediaan Maeda meminjamkan rumah kediamannya untuk rapat mempersiapkan proklamasi. Maeda menjawab “Itu kewajiban saya yang mencintai Indonesia Merdeka”. Pertemuan itu dihadiri pula oleh Nishijima dan Mijoshi. Pada saat itu Maeda kelihatan lelah, walaupun ia tidak kehilangan keseimbangan diri serta wibawa. Laksamana Maeda menyampaikan pesan bahwa sesuai dengan permintaan dari *Gunseikan*, agar rombongan yang kembali dari Rengasdengklok segera menemuinya. Sebelum kedatangan rombongan

tokoh nasional tersebut, di rumah Maeda telah banyak orang hadir diantaranya golongan pemuda dengan seragam PETA-nya.



Ruang penerimaan

Setelah pembicaraan antara tokoh nasional dengan Maeda selesai, maka mereka yaitu Soekarno, Hatta, Mijoshi dan Maeda berangkat menemui “Gunseikan”. Akan tetapi, rombongan itu hanya bertemu dengan Jenderal Nisyimura. Dalam pertemuan itu, sangat mengecewakan tokoh nasional, karena Nisyimura menyatakan bahwa telah terjadi perubahan keadaan yaitu: (*Moh. Hatta, 1979 : 451-452*).

“Kalau tadi pagi masih dapat dilangsungkan proklamasi Indonesia, mungkin pukul satu tadi siang sejak kami tentara Jepang di Jawa menerima perintah atasan, kami tidak lagi mengubah *status quo*. Dengan demikian, maka saat itu tentara Jepang semata-mata hanya alat sekutu dan harus menurut segala perintah sekutu”.

Keterangan dari Nisyimura itu, menimbulkan reaksi dari Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta berupa protes, dan mengingatkan bahwa pihak Jepang tidak menepati janji. Akhirnya rombongan segera

meninggalkan Nisyimura, kembali menuju kediaman Maeda. Ketika pertemuan berlangsung, Maeda telah lebih dahulu pulang dengan diam-diam.

Pada saat yang sama, menurut AA. Hamidhan, anggota PPKI yang menginap di Hotel Des Indes dijemput oleh pemuda dan membawanya ke rumah kediaman Maeda. Setibanya di sana, beberapa anggota PPKI sudah berkumpul. Sambil duduk menunggu. Sebagian besar di antara mereka tidak tahu apa yang ditunggu, mereka diliputi kekhawatiran karena mengalami kejadian malam sebelumnya di “tawan” oleh golongan pemuda. Beberapa pemuda di ruangan rumah itu hilir mudik sambil memandang dengan tajam kepada para anggota PPKI yang hadir di situ. (*Soimun HP, 1986: 40*)

Tengah malam buta, antara tanggal 16 Agustus 1945, dan mendekati waktu tanggal 17 Agustus 1945, rombongan Ir. Soekarno yang pulang dari rumah kediamannya Nisyimura kembali.

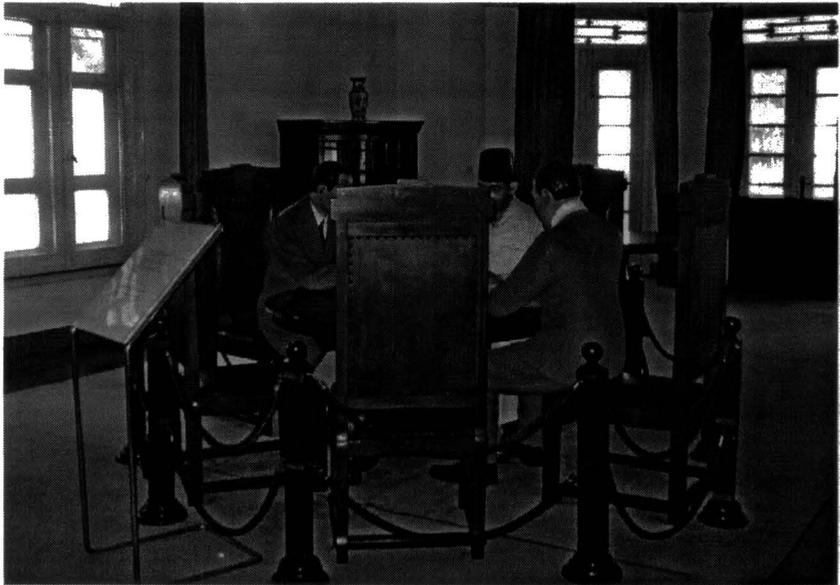
Di rumah Maeda, telah berkumpul banyak orang terdiri dari anggota PPKI, pemimpin-pemimpin pemuda serta beberapa pemimpin pergerakan. Menurut Drs. Moh. Hatta yang hadir sekitar 40 atau 50 orang, sedangkan di jalan luar pekarangan banyak pemuda yang menunggu hasil pembicaraan malam itu.

Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mijoshi segera memasuki kamar depan dan segera disambut oleh Maeda. Pembicaraan pun berlangsung, pemimpin bangsa telah menyatakan bahwa Bangsa Indonesia menolak dijadikan sebagai barang inventaris yang harus diserahkan Jepang kepada sekutu. Untuk itu, mereka menyatakan untuk merdeka sekarang juga serta menunjukkan pada bangsa lain, bahwa sebagai suatu bangsa berhak menentukan nasib sendiri dengan memproklamasikan kemerdekaannya. Maeda mendengarkan penjelasan itu, dengan baik, diapun akhirnya mengundurkan diri menuju kamar tidurnya di lantai atas, hampir-hampir tanpa diketahui.

Dalam memperbincangkan tentang proklamasi itu, untuk teksnya semula akan diberi judul “Maklumat Kemerdekaan” menurut Mr. Iwa Kusumasumantri atas usulnya dengan beberapa pertimbangan

bahwa maklumat akan berarti suatu keputusan dari suatu badan atau pemerintah, sedangkan saat itu yang diperlukan adalah keputusan yang mencerminkan keputusan suatu bangsa yang menyatakan kebebasan dari penindasan penjajah dan menunjukkan keberadaan Bangsa Indonesia yang merdeka. Oleh sebab itu Mr. Iwa Kusumasumantri mengusulkan Teks tersebut diubah judulnya menjadi “Proklamasi”.

Menjelang pukul 03.00, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Soebardjo memasuki ruang makan yang juga dipakai sebagai ruang rapat (sekarang Ruang Perumusan Naskah Proklamasi) dan mengitari sebuah meja bundar, sedangkan Soediro (Mbah), dan BM. Diah mengikuti dan duduk di ruang agak belakang. Ir. Soekarno mulai mempersiapkan draft Naskah Proklamasi, sedangkan Drs. Moh. Hatta dan Mr. Soebardjo menyumbangkan pikirannya, secara lisan. Dalam kesaksian Hatta seperti tertulis dalam bukunya, “Tidak seorangpun di antara kami yang mempunyai teks yang resmi yang dibuat tanggal 22 Juni 1945 yang sekarang disebut Piagam Jakarta”.



Ruang Perumusan Naskah Proklamasi

Rumusan teks proklamasi ditulis dalam kertas bergaris-garis biru, yang menurut Ir. Soekarno didapatnya dari seseorang dengan memberikan buku catatan bergaris-garis biru. Setelah teks diberi judul “Proklamasi” dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan ketiga tokoh nasional itu adalah, “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”, kata-kata keramat yang merupakan amanat penderitaan rakyat Indonesia telah mengalir dengan lancar dan khidmat dari sanubari ketiga pemimpin bangsa, dan diguratkan dalam bentuk tulisan untuk menuju kenyataan. Akhirnya selesailah konsep naskah proklamasi tersebut, rumusan pernyataan kemerdekaan itu terdapat beberapa coretan sebagai tanda pertukaran pendapat dalam merumuskannya.

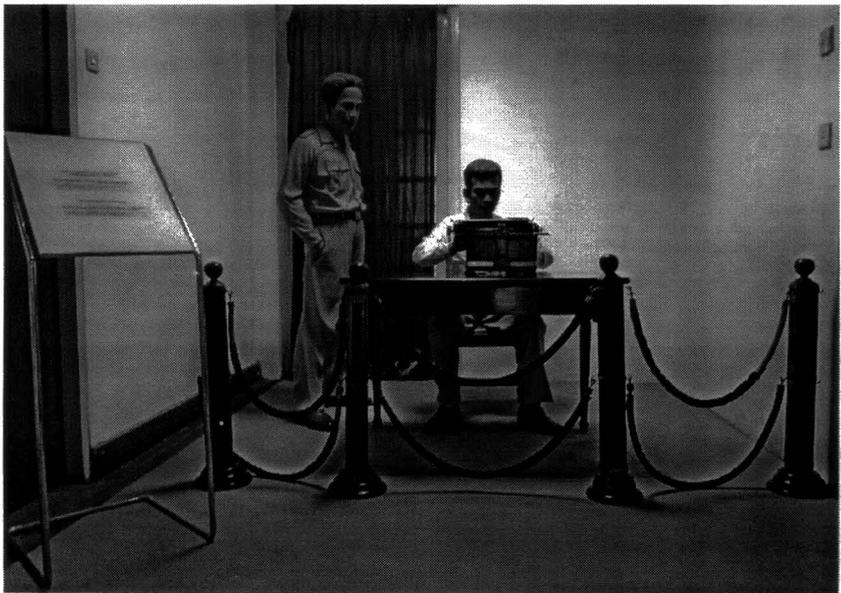
Konsep naskah proklamasi itu dibawa ke serambi muka menemui para hadirin. Soekarno mulai membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Sesudah itu beliau bertanya kepada hadirin, setuju atau tidaknya rumusan itu. Menurut Drs. Moh. Hatta, jawaban dari hadirin adalah gemuruh suara menyatakan setuju kemudian diulangi lagi pernyataan oleh Ir. Soekarno “Benar-benar saudara setuju?” jawabannya adalah sama yaitu “setuju”. Ketika sampai saat menandatangani, timbul pertentangan pendapat dan suara gaduh. Menurut Mr. Teuku Mohammad Hasan, ada tiga usul yang diajukan dalam menandatangani Naskah Proklamasi yaitu:

1. Menandatangani semuanya.
2. Membagi kelompok yang hadir dari tiap kelompok satu orang menandatangani
3. Hanya ketua dan wakil ketua saja yang menandatangani.

Dalam bukunya Mr. Soebardjo menuliskan, bahwa dalam suasana tegang itu Sayuti Melik mengadakan *lobbying*, agar naskah proklamasi itu hanya ditandatangani dua orang saja yaitu : Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Akhirnya Soekarno maju ke muka dengan suara lantang mengatakan: “Bukan kita semua yang hadir disini, harus menandatangani naskah, cukup dua orang saja menandatangani atas nama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta”.

Akhirnya usul itu diterima hadirin dengan tepuk tangan dan berseri. Ir. Soekarno meminta agar Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur, (sekarang Ruang Pengetikan Naskah Proklamasi), dengan ditemani oleh BM. Diah. Menurut Satzuki Mishima, konsep naskah proklamasi itu tidak dapat langsung diketik karena di rumah Maeda tidak tersedia mesin tik. Untuk itu, Satzuki Mishima dengan mengendarai mobil Jeep pergi ke kantor Militer Jerman untuk pinjam mesin tik.

Terlepas dari pendapat itu, konsep naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dengan mengadakan perubahan tiga kata, “tempoh” menjadi “tempo” kata, “wakil-wakil bangsa Indonesia”, berubah menjadi “Atas Nama Bangsa Indonesia” begitu pula dalam penulisan hari dan bulannya. Konsep naskah proklamasi tulisan tangan Ir. Soekarno diletakkan begitu saja oleh Sayuti Melik, kemudian BM. Diah, mengambilnya (sekarang Naskah itu ada di Arsip Nasional).



Ruang pengetikan naskah Proklamasi

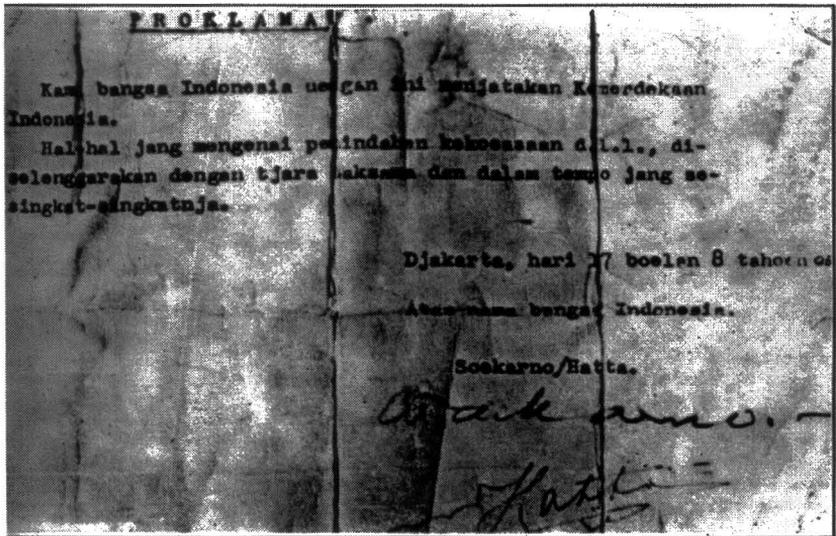
Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan
ini menjabarkan kemerdekaan Indonesia

Wakil yang menguraikan ^{perjuangan} ~~perjuangan~~ ^{perjuangan} ~~perjuangan~~
dan kebebasan, d. l. l., ^{di samping} ~~di samping~~ ^{di samping} ~~di samping~~
dengan jiwa sakwasama dan dalam
komponen yang selengkap-lengkap
nya.

Djakarta, 17-8-'45
Wakil-bangsa Indon

Teks Proklamasi yang ditulis tangan oleh Ir. Soekarno



Teks Proklamasi hasil ketikan Sayuti Melik, merupakan Teks otentik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta

Setelah naskah proklamasi selesai diketik segera dibawa ke tempat hadirin, yaitu ruangan besar di bagian depan rumah (sekarang ruang pengesahan Naskah Proklamasi), untuk ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama Bangsa Indonesia sebagai tanda disyahkan Naskah Proklamasi serta pertanda gema suara hati Bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajah, yang tertuang dalam Naskah Proklamasi, menjelang waktu subuh, Kamis malam jum'at bulan suci Ramadhan di jalan Meiji Dori No.1 Jakarta, pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah naskah ditandatangani, timbul persoalan lain yaitu bagaimana dan dimana proklamasi harus diumumkan. Ada usul mengajukan agar dilakukan di lapangan Ikada (sekarang lapangan Monas bagian selatan). Namun karena lapangan Ikada sifatnya umum dan rapat umum yang tidak diatur sebelumnya dengan penguasa, mungkin akan menimbulkan salah paham bahkan tidak mustahil akan terjadi bentrokan kekerasan antara rakyat dengan penguasa yang akan membubarkan rapat

tersebut. Pembicaraan mengenai tempat pembacaan naskah proklamasi itu tidak berlangsung lama, dan atas pertimbangan tadi maka Ir. Soekarno mengumumkan bahwa Pembacaan Naskah Proklamasi diadakan di halaman depan rumah kediamannya, yaitu di jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang gedung POLA), pukul 10 pagi.



Ruang Pengesahan Naskah Proklamasi

Sidang yang merupakan pertemuan bersejarah itu ditutup tatkala fajar tanggal 17 Agustus 1945, mulai menyingsing. Hadir pada pertemuan bersejarah itu antara lain :

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Moh. Hatta
3. Mr. Achmad Soebardjo
4. Mr. A. Abbas
5. Dr. Muhammad Amir
6. Dr. Boentaran Martoatmodjo
7. Mr. I Goesti Ketut Poedja
8. Mr. R. Iwa Kusumasumantri
9. Mr. Johannes Latoeharhary
10. Ki Bagoes Hadji Hadikoesoemo
11. Mr. Teukoe Moehammad Hasan
12. Ki Hadjar Dewantara (Mas Suwardi Suryoningrat)
13. R. Otto Iskandardinata
14. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
15. Dr. Abdoel Rivai
16. Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo
17. Prof. Dr. Mr. R. Soepomo
18. R. Soekardjo Wirjopranoto
19. Dr. G.S.S.J. Ratulangi
20. Burhanuddin Moehammad Diah
21. Soekarni
22. Chaerul Saleh
23. Sayuti Melik
24. Anang Abdoel Hamidhan
25. Andi Pangerang
26. Andi Sultan Daeng Radha

27. Semaun Bakry
28. Soediro (Mbah)
29. Abikoesno Tjokrosoejoso
30. Dr. Samsi Sastrowidagdo

Setelah selesai pertemuan itu, para hadirin mulai bergerak meninggalkan ruangan dengan masing-masing perasaan dan pikiran yang macam-macam untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Satu sama lain hadirin saling memberi ucapan selamat. Ketika hal itu berlangsung. Maeda menuruni tangga menuju ruang tamu, beliau mengulurkan tangan kepada Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan hadirin yang lain dengan mengucapkan selamat atas hasil yang dicapai. Setelah ucapan selamat dari tuan rumah, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada tuan rumah dan minta diri untuk meninggalkan rumah beliau yang merupakan saksi bisu rekaman sejarah tempat berlangsungnya Perumusan dan Pengesahan Naskah Proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan menjadikan satu monumen penting dari awal berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Sementara itu, beberapa persiapan untuk menyongsong lahirnya Indonesia Merdeka dilakukan, antara lain pencetakan kilat naskah Proklamasi untuk disebar ke seluruh Indonesia, dilakukan oleh para pemuda yang bekerja di kalangan Pers dengan ketuanya B.M. Diah, sedangkan yang bekerja di bagian penyiaran melaksanakan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan ke seluruh dunia. Oleh karena pemancar radio yang berkekuatan tinggi hanya ada di Bandung, maka dengan perantaraan telepon, Jakarta *Hooso Kyoku* (Radio Jakarta) menghubungi Radio Bandung, agar dapat menyiarkan pembacaan Proklamasi (*Tim Fakultas Sastra UNPAD, 1977-1978: 66*)

Untuk itu Radio Bandung bekerja sama dengan para pemuda PTT, menyiarkan berita proklamasi itu dari stasiun radio Tegal Lega, penyiaran proklamasi itu dilakukan oleh Sakti Alamsyah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, diselingi dengan Instrumentalia lagu Indonesia Raya.

Dalam bukunya, "Bung Hatta Menjawab", Hatta memperkirakan seandainya rapat PPKI jadi diadakan, proklamasi kemerdekaan mungkin akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 di Pejambon 6. Hal itu karena dinalarkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 1945, kelompok

pemuda telah melakukan desakan yang kuat agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan dan pada malam itu Hatta sudah mempersiapkan bahan rapat, antara lain mengetik pembukaan Undang-undang Dasar yang sampai saat itu dinyatakan sebagai Naskah Proklamasi. Tetapi sejarah menentukan lain.

Tepat pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Moh. Hatta sebagai “Dwi Tunggal”, lambang wakil bangsa dan pemimpin Persatuan Bangsa Indonesia disaksikan oleh para hadirin, dengan didahului oleh pidato singkat.

Dibacakannya proklamasi itu, berarti lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat serta harus kita bela dan pertahankan dengan segenap jiwa dan raga. Tatkala itu, rakyat di seluruh pelosok tanah air bangkit dan bersiap-siap menjaga kemungkinan. Ada yang mengasah golok atau menyiapkan senjata lainnya, seolah-olah ada suruhan batin yang mengatakan bahwa proklamasi kemerdekaan itu menuntut perjuangan yang hebat dan dahsyat.

Dari gambaran di atas, nyatalah bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah yang diberikan Jepang, melainkan sebagai hasil dari hasrat dan perjuangan rakyat Indonesia dan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Dilihat dari sudut sosiologis, tampak bahwa proklamasi itu dilaksanakan oleh dua kekuatan pokok, yaitu kekuatan generasi tua di bawah pimpinan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dan kekuatan generasi muda. Sesuai dengan sifat-sifat manusia yang wajar, kaum tua lebih cenderung kepada cara-cara perjuangan yang penuh perhitungan dan tidak banyak membawa resiko, sedangkan para pemuda menghendaki kekerasan dimana resiko dianggap suatu hal yang sudah semestinya ada dalam setiap perjuangan. Mereka tidak menghendaki kemerdekaan hadiah, kemerdekaan yang mereka inginkan ialah kemerdekaan yang direbut dan ditegakkan sendiri dengan resiko pertumpahan darah secara besar-besaran. Dan gambaran yang kita lihat, jelas bahwa proklamasi kemerdekaan itu merupakan hasil daripada kedua kekuatan sosial itu.

Dari uraian di atas, rangkaian peristiwa yang terjadi di gedung jalan Imam Bonjol No.1 Jakarta merupakan awal berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena ini, sewajarnya apabila gedung tersebut direalisasikan untuk dijadikan sebuah Museum.



Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno yang didampingi Drs. Moh. Hatta sebagai wakil Bangsa dan pemimpin persatuan bangsa Indonesia, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi)

B. Hubungan Museum Perumusan Naskah Proklamasi dengan Museum Lain

Pada dasarnya sejarah umat manusia itu merupakan rangkaian perjuangan manusia dalam rangka mempertahankan eksistensinya, dan dalam rangka perjuangan untuk mencapai cita-citanya. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, sebagian besar museum dapat berperan sebagai sarana komunikasi antar generasi sehingga akan memudahkan generasi sekarang dan generasi yang akan datang untuk mempelajari dan menghayati peristiwa sejarah tersebut.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan museum sejarah yang merekam peristiwa sejarah awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, peristiwa bersejarah itu telah berlangsung dalam suatu suasana yang mengandung baik unsur kerahasiaan, maupun urgensi yang sangat mendesak. Oleh karena itu, perekaman-perekaman peristiwa dengan gambar (foto) tidak terjadi. Namun demikian gedung itu merupakan saksi bisu peristiwa bersejarah mengenai Perumusan Naskah Proklamasi.

Sejalan dengan peristiwa yang terjadi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi maka hubungan Museum Perumusan Naskah Proklamasi dengan sejarah yang lain akan berkaitan satu sama lain. Untuk itu, Museum Perumusan Naskah Proklamasi sangat berkaitan dengan museum sejarah yang berkaitan dengan pergerakan nasional. Pengungkapan hubungan museum tersebut, diawali dengan museum sejarah yang merekam peristiwa awal tumbuhnya pergerakan nasional.

Perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai dengan perlawanan yang biasa disebut dengan protes sosial, perlawanan semacam ini pada umumnya berlangsung tidak lama dan merupakan pergerakan lokal yang tidak ada koordinasi antara satu dengan yang lain.

Bangsa Indonesia mulai menyadari perlunya persatuan untuk perjuangan mencapai Indonesia merdeka, dalam babakan ini disebut masa Kebangkitan Nasional (1908-1942). Sebagai pengejawantahan Kebangkitan Nasional bangsa Indonesia, yaitu didirikannya "Budi

Utomo” oleh Dr. Soetomo dan kawan-kawan sebagai perkumpulan modern, yaitu perkumpulan yang mempunyai nama, pengurus, anggota, maksud dan tujuan serta rencana kerja. Tujuan Budi Utomo yaitu kemajuan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, tehnik, industri, dan kebudayaan.

Berdirinya Budi Utomo, merupakan zaman baru di Indonesia yaitu zaman Pergerakan di Indonesia, oleh karena itu, hari lahir Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dinamakan Hari Kebangkitan Nasional sejalan dengan itu, maka Museum Kebangkitan Nasional diabadikan di gedung bekas STOVIA, jalan Dr. Abdurahman Saleh No. 26 Jakarta tempat didirikannya Budi Utomo.

Sejak berdirinya Budi Utomo, bermunculanlah perkumpulan-perkumpulan yang dalam kenyataannya merupakan awal dari persatuan dan kesatuan Bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Atas dasar persamaan cita-cita dan persamaan keinginan itulah pada tanggal 28 Oktober 1928 dicetuskan “Sumpah Pemuda”, yang merupakan unjuk rasa Bangsa Indonesia dalam rangka perjuangan mencapai Indonesia Merdeka. Sumpah Pemuda, lahir pada kongres pemuda ke II tanggal 28 Oktober 1928, yang bertempat di bekas gedung *Indonesisch Clubgebouw (IC)* di jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta. Pada waktu itu, pertama kalinya diperdengarkan lagu “Indonesia Raya” di muka umum oleh komponis besarnya WR. Supratman.

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, telah dibentuk BPUPKI yang dalam sidangnya telah menghasilkan naskah pernyataan Indonesia merdeka (Piagam Jakarta), Naskah Pembukaan Undang-undang Dasar, dan Naskah UUD. Hal ini berlangsung di jalan Pejambon 6 (sekarang gedung Pancasila).

Saat-saat menjelang proklamasi itu, para pemuda Revolusioner mendesak Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Adanya perbedaan pendapat antara para pemuda revolusioner dengan Ir. Soekarno - Drs. Moh. Hatta menyebabkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Para pemuda Revolusioner bermarkas

di jalan Menteng 31 (sekarang gedung Joang 45), yang merupakan Asrama Angkatan Baru Indonesia yang dipimpin oleh Soekarni dan Chairul Saleh. Asrama tersebut, pada tanggal 1 Maret 1934, ditutup, baru pada pertengahan 1944, dibuka kembali menjadi asrama pemuda. Oleh karena asrama itu dipakai tempat kursus soal politik, dengan pengajarnya beberapa tokoh nasional antara lain Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Soebardjo, Soediro (Mbah), Mr. Iwa Kusumasumantri, Sutan Sjahrir dan lain-lain, maka asrama tersebut diganti namanya menjadi asrama Indonesia Merdeka. Menjelang saat-saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Gedung Joang 45 dijadikan markas oleh para tokoh pemuda revolusioner.

Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1945 dan mendekati 17 Agustus 1945, terjadilah peristiwa bersejarah dalam merumuskan Naskah Proklamasi, di jalan Meiji Dori (sekarang Museum Perumusan Naskah Proklamasi, di jalan Imam Bonjol No.1), yang saat itu adalah rumah kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda.

Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 pagi, hari Jum'at. Naskah Proklamasi dibacakan oleh Ir. Soekarno yang didampingi Drs. Moh. Hatta di jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Gedung Pola, jalan Proklamasi 56), yang saat itu adalah rumah kediaman Ir. Soekarno. Sejak itu, mulailah periode baru bagi bangsa merdeka dan berdaulat serta menuju tahapan baru untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan yang telah diproklamasikan.

BAB IV

MENINJAU MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI DARI DEKAT

A. Sejarah Bangunan

Sejarah mengenai didirikannya bangunan ini tidak dapat diungkapkan secara tepat karena tidak ada catatan yang tepat mengenai tanggal, bulan dan tahun berapa bangunan ini diperkirakan berdiri, namun demikian, bangunan ini diperkirakan berdiri sekitar tahun 1920. Begitu pula mengenai pemilik gedung tersebut, sangat sedikit sekali diketahui. Namun demikian, dalam surat ukur No.955 tanggal 21 Desember 1931, pemiliknya atas nama PT. Asuransi Jiwasraya Nilmy (*Nederlands Levenzekering Maatschapij*), adalah bekas hak guna bangunan No. 1337/Menteng, dengan luas tanah 3.914 M². Di samping itu, diuraikan dalam surat ukur No.956 Eigendom Verponding No. 17758, dengan luas bangunan 1.138.10 M².

Sebelum pecah perang Pasifik, bangunan ini dipakai sebagai gedung “British Consult General” (Konsulat Jenderal Inggris), dan ini berlangsung sampai Jepang menduduki Indonesia.

Pada masa Hindia Belanda, gedung ini terletak di jalan yang dinamai Nassau Boulevaard. Selanjutnya ketika pendudukan Jepang, nama jalan ini diubah menjadi Meiji Dori. Hal tersebut, sesuai dengan politik Jepang untuk men-Jepang-kan negeri yang dikuasainya. Pada waktu itu menjadi tempat kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda beserta keluarganya. Beliau adalah kepala kantor penghubung antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang. Berdasarkan foto dokumentasi yang diperoleh dari Ny. Satzuki Mishima, penghuni gedung tersebut antara lain, Sugimura, Hirako, dan beberapa pembantu rumah tangga yang dikoordinir oleh Ny. Satzuki Mishima, sebagai sekretaris Maeda untuk urusan rumah tangga.

Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, gedung ini tetap menjadi tempat tinggal Laksamana Muda Tadashi Maeda.

Sampai sekutu mendarat di Indonesia bulan September 1945. Selanjutnya gedung ini dikuasai oleh tentara Inggris, dan digunakan sebagai Markas Tentara Inggris.



Laksamana Maeda dan para pembantunya

Pemindahan status pemilik gedung ini, dari milik Inggris menjadi pemerintah Indonesia, terjadi dalam aksi nasionalisasi terhadap milik bangsa asing di Indonesia. Pada waktu itu, dipakai tempat kediaman resmi Duta Besar Inggris.

Pemerintah Indonesia, menyerahkan pengelolaannya kepada Departemen Keuangan yang selanjutnya dikelola oleh Perusahaan Asuransi Jiwasraya. Pada tahun 1961, Perusahaan Asuransi Jiwasraya mengontrakkan gedung ini kepada Kedutaan Inggris sampai bulan Juni 1981.

Mendekati berakhirnya masa kontrak tersebut, Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah DKI Jakarta, menyampaikan hasil keputusan rapat koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentang putusan rapat, untuk menjadikan gedung yang terletak di jalan Imam Bonjol No.1 Jakarta Pusat, sebagai Monumen Sejarah Indonesia. Berdasarkan pertimbangan rapat dinyatakan pula, bangunan tersebut mengandung nilai sejarah yang sangat penting.

Gedung ini, diterima oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Desember 1981. Untuk sementara, gedung ini dikelola Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta. Kemudian pada tahun 1982, gedung ini ditempati Perpustakaan Nasional, sebagai perkantoran. Selanjutnya pada tahun 1984, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada waktu itu Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, memberikan instruksi kepada Direktur Permuseuman, agar segera merealisir gedung bersejarah tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Akhimya pada tanggal 26 Maret 1987, gedung ini diserahkan kepada Direktorat Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, untuk dijadikan Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985 : 5)

B. Keadaan Bangunan

Gedung yang terletak di jalan Imam Bonjol No. 1, menghadap ke sebelah Utara. Bangunan, didirikan dalam lingkungan yang terencana

dengan mencontoh gaya arsitek Eropa, dengan istilah “Art Deco”. Gedung bercat warna putih dan megah ini, diapit oleh Kedutaan Saudi Arabia dan Gereja Santo Paulus. Sedangkan menurut pengukuran terakhir, luas bangunan 1.138.10 M², dan luas tanahnya 3.914 M². Dengan demikian, halaman muka dan bagian belakang cukup luas.

Menurut Ny. Satzuki Mishima, keadaan gedung telah sedikit berubah bila dibandingkan saat terjadinya Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bagian samping kiri gedung, ditambah dan di bagian sebelah belakang gedung terdapat bangunan baru. Sedangkan di bagian dalam, ada pintu yang ditiadakan dan bekasnya ditutup tembok baru. Begitu pula dengan ruang perumusan yang dulu berfungsi sebagai dapur, telah ditiadakan, sehingga pembagian ruang dapur telah berubah.

Ruangan yang terdapat di dalam gedung, antara lain: sebuah ruang tamu yang besar dengan sebuah serambi kecil di sebelah kiri, ruang makan yang memanjang di bagian kanan dengan tembok yang melengkung pada ujung belakang dan ruang dapur yang berbentuk empat persegi. Bangunan ini bertingkat, di tingkat atas terdapat beberapa ruangan yang digunakan sebagai ruang tidur. Di samping itu, halaman bagian depan bangunan terdapat sebuah gardu (pos penjagaan) tepatnya di sebelah kiri gedung. Sebagai pelengkap, gedung tersebut memiliki beberapa pohon rindang yang menutupi sebagian gedung. Ny. Satzuki Mishima mengatakan, bahwa ruangan di bawah tanah yang berada di halaman belakang merupakan lubang perlindungan.

Menurut ingatan Ny. Satzuki Mishima, dahulu dinding luar dan dalam diberi warna kelabu. Sedangkan keadaan jendela, masih tetap seperti dulu, dan tiap jendela mempunyai dua jenis jendela yaitu yang terletak di bagian luar berdaun jendela kayu diberi jalusi dan bagian dalam kayu diberi kaca. Sedangkan kayu kusen dan daun jendela diberi politur berwarna coklat tua. Semua jendela dipasangkan dua jenis kain jendela, yaitu pada bagian dalam berwarna biru muda dan bagian dalam

diberi vitrage berwarna putih yang terbuat dari kain tulle dengan pinggir kain diberi berbiku. Untuk alat penggantung kain jendela, terbuat dari pipa kuning tipis dan diberi gelang untuk dijahitkan pada pinggir atas kain jendela. Selanjutnya, semua pintu dipasang kain pintu berwarna biru muda yang digantungkan pipa kuning yang bentuknya seperti kain jendela.

C. Ruang Bersejarah

Sejarah gedung ini menjadi sangat penting sebagai awal sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di samping itu, dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, bukan hanya dilakukan perjuangan dengan mengangkat senjata, akan tetapi dilakukan pula dengan perjuangan diplomasi. Awal perjuangan diplomasi itu terjadi di gedung ini, yaitu pada tanggal 17 Nopember 1945, saat itu gedung ini merupakan Markas Besar Tentara Inggris. Berdasarkan foto Ipphos dan buku 30 Tahun Indonesia Merdeka, pertemuan terjadi di ruang yang sekarang disebut ruang Perumusan Naskah Proklamasi. Pada pertemuan itu, dari pihak Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir, pihak Belanda oleh H.J. van Mook sedangkan pihak sekutu diwakili oleh Letnan Jenderal Chritson, sebagai pemrakarsa. Tujuan pertemuan itu dimaksudkan untuk mempertemukan pihak Indonesia dan pihak Belanda, di samping menjelaskan maksud kedatangan tentara sekutu. Akan tetapi, pertemuan itu berakhir tanpa hasil apapun.

Pada tanggal 7 Oktober 1946, atas jasa baik Inggris, di gedung ini diadakan perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda yang bersengketa di ruang yang sekarang disebut Ruang Perumusan Naskah Proklamasi. Pemerintah Inggris mengutus wakilnya Lord Killearn sebagai penengah, sedangkan utusan pemerintah Indonesia diketuai oleh Sutan Sjahrir dan pihak Belanda diketuai oleh Prof. Schemerhorn. Dalam pertemuan itu, menghasilkan persetujuan gencatan senjata, yang isinya sebagai berikut :

1. Gencatan senjata diadakan atas dasar kedudukan militer pada waktu itu dan atas dasar kekuatan militer Sekutu serta Indonesia.
2. Dibentuk sebuah komisi bersama gencatan senjata, untuk masalah-masalah teknis pelaksanaan gencatan senjata (Sekretariat Negara, 1977: 109). Persetujuan gencatan senjata itu, ditanda tangani tanggal 14 Oktober 1946.



Sutan Sjahrir dari pihak Indonesia sedang bersalaman dengan Prof. Schemerhom dari pihak Belanda, dan sebagai penengah dari pihak Inggris Lord Killeam menyaksikan peristiwa tersebut, berlangsung di Gedung Jalan Imam Bonjol No.1 Jakarta.

Oleh karena kejadian yang amat penting terjadi di gedung ini, adalah Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi, maka museum ini dinamakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dengan demikian, pembagian ruangnya didasarkan pada proses terjadinya peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi, yaitu :

1. Ruang Penerimaan

Menurut BM. Diah, ruang ini dipenuhi dengan kursi yang empuk. Sedangkan menurut Ny. Satzuki Mishima, ruangan ini digunakan Maeda, sebagai kantor dan ruang tamu khusus, yang didalamnya terdapat seperangkat kursi tamu yang terdiri dari satu meja, satu sofa dan dua kursi tersebut dari besi tipis chromo nikel dengan alas duduk yang dilapisi dengan kulit berwarna coklat tua. Meja berbentuk empat persegi panjang dan kursi diletakkan dekat jendela. Antara pintu dan ruang Penerimaan dengan ruangan Perumusan, diletakkan lemari buku yang berpintu kaca, terbuat dari kayu dengan warna coklat tua. Sedangkan dinding yang dibelakangi meja tulis, terdapat dua buah lukisan cat minyak bergambar pemandangan di sawah yang berlatar belakang gunung.

Di ruangan ini merupakan tempat peristiwa sejarah yang pertama dalam persiapan perumusan naskah proklamasi. Di ruang ini pada tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 22.00 WIB, sepulang dari Rengasdengklok, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo diterima oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda. Para wakil bangsa Indonesia tersebut, memberikan penjelasan kepada Maeda, tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia Merdeka. Maeda mengizinkan rumah kediamannya untuk maksud tersebut. Atas pesan *Gunseikan* yang disampaikan oleh Maeda, bahwa rombongan yang pulang dari Rengasdengklok diminta untuk menemuinya. Selanjutnya, berangkatlah mereka dengan disertai oleh Maeda dan Mijoshi. Akan tetapi rombongan tersebut, hanya bertemu dengan Jenderal Nisyimura yang mengatakan bahwa proklamasi Indonesia tidak boleh dilangsungkan karena Jepang diperintah oleh sekutu untuk tidak mengubah *status quo*.

Sekitar pukul 02.30 WIB Bung Karno dan rombongan, tiba kembali di rumah kediaman Maeda. Di ruangan ini pula, Maeda menerima penjelasan dari para wakil bangsa Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan sekarang juga. Untuk selanjutnya, Maeda tidak turut campur tangan dan segera mohon diri menuju kamarnya di lantai atas. (Kaset pidato BM. Diah: Agustus 1985).

2. *Ruang Perumusan Naskah Proklamasi.*

Ny. Satzuki Mishima, mengatakan bahwa ruang ini, digunakan Maeda sebagai ruang makan dan tempat rapat. Di ruang ini, terdapat sebuah meja dengan daun meja berbentuk bundar yang dilengkapi dengan lima buah kursi tanpa sandaran tangan, terbuat dari kayu jati dengan warna politur coklat tua. Sedangkan meja dan kursi itu, ditempatkan di sudut kiri dinding belakang ruang itu. Di ruang ini terdapat pula sebuah meja panjang yang dilengkapi dengan 12 buah kursi dengan sandaran tangan, alas duduk dan sandaran dilapisi kulit berwarna coklat tua. Begitu pula meja dan kursinya berwarna coklat tua dari politur yang ditempatkan di bagian tengah ruang dan memanjang dari depan ke belakang.

Di samping itu, sebagian lantai ruangan ini ditutupi karpet berwarna kelabu. Selain itu, terdapat lampu gantung kristal besar pada bagian tengah ruangan. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ruangan, ditempatkan masing-masing satu lemari buku yang terbuat dari kayu dan berpintu kaca, dengan warna coklat tua dari politur. Lemari itu, digunakan sebagai tempat penyimpanan piring dan gelas makan. Di dinding depan ruang dekat pintu antara ruang itu dengan ruangan penandatanganan Naskah Proklamasi diletakkan sebuah meja dinding yang terbuat dari kayu dengan warna politur coklat tua. Di atas kedua lemari buku diletakkan jambangan bunga besar yang terbuat dari porselen Jepang berhiaskan motif bunga berwarna dibuat awal abad 20. Sedangkan di atas meja dinding, diletakkan sebuah jambangan bunga yang berbentuk lebih kecil. (Kaset wawancara dengan Ny. Satzuki Mishima : 21 Agustus 1985).

Di ruangan ini, dini hari sekitar pukul 03.00 WIB tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Soebardjo mengonsepsi dan merumuskan Naskah Proklamasi. Konsep Naskah Proklamasi ini, dalam bentuk tulisan tangan Bung Karno, sedangkan Bung Hatta dan Mr. Soebardjo menyumbangkan pikiran secara lisan.

3. Ruang Pengetikan

Ruang ini dengan ruang perumusan dahulu dihubungkan dengan pintu kaca yang sekarang ditutup dengan tembok baru.

Di ruangan ini, naskah proklamasi yang disetujui oleh hadirin, diketik oleh Sayuti Melik, dengan mengadakan perubahan tiga kata.

Di ruang penandatanganan dan pengesahan naskah proklamasi, konsep naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno di hadapan hadirin. Setelah naskah tersebut, disetujui oleh hadirin, maka konsep naskah proklamasi itu oleh Bung Karno diberikan kepada Sayuti Melik, untuk di ketik di ruangan yang sekarang disebut Ruang Pengetikan. Setelah pengetikan selesai, pada tanggal 17 Agustus 1945, sekitar pukul 04.00 WIB, Bung Karno dan Bung Hatta segera menandatangani naskah proklamasi itu, atas nama bangsa Indonesia dan merupakan tanda syahnya kemerdekaan tersebut. Pertemuan ini, dihadiri oleh beberapa orang yang mewakili bangsa Indonesia dan golongan pemuda.

4. Ruangan Penandatanganan/Pengesahan Naskah Proklamasi

Maeda menggunakan ruangan ini sebagai ruang rapat dan ruang menerima tamu yang berjumlah banyak. Di tengah ruangan ini, diletakkan dua buah meja empat persegi panjang yang masing-masing dilengkapi dengan enam buah kursi yang diberi politur berwarna coklat tua. Kedua belas kursi tanpa sandaran tangan, alas duduk dan sandarannya dilapisi dengan kulit berwarna coklat tua. Di bagian tengah ruang terdapat dua buah lampu kristal kecil. Di samping itu, dekat dinding sebelah belakang ruang, terdapat seperangkat meja tamu, yang terdiri dari satu sofa, kursi dan satu meja panjang, terbuat dari besi

dilapisi chromo nikel dengan alas yang dilapisi kulit berwarna coklat tua. Di bagian tengah anak tangga itu ditutup dengan karpet berwarna merah, di sandaran tangan tangga pada ujungnya terdapat satu lampu kristal (berdasarkan foto dokumentasi Satzuki Mishima).

Di bawah tangga yang baik ke lantai atas, diletakkan sebuah piano besar. Di dinding dekat meja tamu, diletakkan delapan buah jenis tombak bertangkai panjang yang disusun pada standar tombak yang berukir. Di samping itu, terdapat sebuah meja belajar dengan tutup berbentuk melengkung terbuat dari kayu berwarna coklat tua. Sedangkan di atas laci meja, diletakkan sebuah vitrine yang berisi dua ekor burung Cendrawasih yang diawetkan.

BAB V

PENUTUP

Menilai proses orientasi pembentukan sejarah merupakan strategi alternatif atau pembentukan sejarahnya sendiri, sehingga faktor subjektifitas akan lebih dominan dibanding dengan objektifitas. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila terdapat perbedaan mengenai jalannya peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi yang diantaranya disampaikan oleh para pelaku sejarah itu sendiri.

Terlepas dari pendapat tersebut, penderitaan dan kesengsaraan yang dialami Indonesia pada masa penjajahan, menimbulkan perjuangan baik yang dilakukan dengan senjata maupun yang dilakukan dengan mengadakan organisasi yang teratur untuk melawan penjajah, mendapat penghormatan dan penghargaan yang tinggi, karena perjuangan itu telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia.

Peristiwa Perumusan Naskah merupakan awal dari realisasi hasrat bangsa Indonesia untuk merdeka, yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945, melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah Jepang, melainkan hasil dari hasrat perjuangan rakyat Indonesia dan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Adanya dua kekuatan sosial yang nasionalis, yaitu pemuda revolusioner dan generasi tua, adalah sebagai kekuatan potensial dari perjuangan kemerdekaan walaupun mulanya mereka bertentangan, namun kemudian mereka mencapai kesepakatan dalam melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, tercermin jiwa kepeloporan di antara mereka dalam menggalang kesatuan dan persatuan bangsa.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi, merupakan tempat terjadinya peristiwa sejarah awal berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga apabila dikaji secara mendalam, akan terlihat

hubungannya dengan museum sejarah yang berkaitan dengan pergerakan Nasional.

Mengingat peranan dan fungsi Museum Perumusan Naskah Proklamasi, maka perlu dilestarikan untuk mengenang dan menghayati sejarah perjuangan bangsa.

Disadari sepenuhnya bahwa untuk mewujudkan peristiwa yang terjadi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi sangat sulit, sehingga perwujudannya tidak seperti pada waktu peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu, pengumpulan data kesejarahan dan museologis yang menyangkut peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi perlu dianalisa seobjektif mungkin, sehingga visualisasinya akan sama dengan keadaan pada saat terjadinya peristiwa, atau paling tidak akan mendekati. Dengan demikian, akan tercapai kelurusan dan kebenaran sejarah, khususnya peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi.

DAFTAR SUMBER

A. BUKU

- Adam, Cindy, 1984. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Aziz, M.A. 1955. *Japan's Colonialism and Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Benda, Harry J. Et al. 1965, *Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Documents, Southeast Asian Studies* (Translation Series No.6) Yale University.
- _____ 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Terjemahan Daniel Dhakidae*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Brugmans, I.J. et al 1960. *Nederlands Indie Order de Japanese Bezetting. Gegeven en Documenten Over de Jaren 1942-1945*. Franeker.
- Dewantara, Ki Hajar. 1952. *Dari Kebangunan Nasional Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, Jakarta: N.V. Pustaka.
- Diah, B.M. 1983. *Angkatan Baru 45*. Jakarta: PT. Masa Merdeka.
- Djaya, Tamar. 1981. *Soekarno Hatta Persamaan dan Perbedaannya*, Jakarta: Sastra Hudaya.
- Djoyoadisuryo, Ahmad Subardjo. 1972. *Lahirnya Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Kinta.
- _____ 1978, *Kesadaran Nasional, Sebuah otobiografi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Elsbree, Williard H, 1953. *Japan's role in Southeast Asian Nationalist Movements 1940-1945*. Cambridge: Harvard University Press.
- Geentz, Cl. 1964. *The Religion Of Java*. Illinois: Glencoe.
- Hatta, Mohammad, 1979. *Mohammad Hatta, Memoir*, Jakarta: Tinta Mas.

- Hp, Soimun, 1986. *H.A.A Hamidhan, Pejuang dan Perintis Pers di Kalimantan*, Jakarta: Ditjarahnitra.
- Ibrahim, Muhammad, 1983. *Mr. Teoekoe Mohammad Hasan, Karya dan Pengabdiannya*. Jakarta: Ditjarahnitra Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Indonesia, Arsip Nasional, Thn. *Pendaftaran Orang Indonesia yang terkemuka di Jawa 1942-1943*. Gunseikanbu Tjabang I, Pegangsaan Timur 36 Jakarta.
- _____ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1945. *laporan Tim Kesejahteraan Pendirian Museum Perumusan Naskah Proklamasi*. Jakarta: Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Jakarta: Pengembangan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- _____ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986. *Penelitian Museologis Pendirian Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta 1985/1986*. Jakarta.
- _____ Lembaga Soekarno Hatta. 1984. *Sejarah Lahirnya UUD '45 dan Pancasila*. Jakarta: Idayu.
- _____ Sekretariat Negara, 1973. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta.
- Kahin, George MC.T. 1952. *Nasionalisme dan Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University.
- Kanabele, George Sanford, 1967. *The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence*. Ph. D. Thesis, Cornell University.
- Kartodirdjo, Sartono, 1967. *Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia Abad IX-XX (Lembar Sejarah)*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.
- Kartodirdjo, Sartono et al 1977. *Sejarah Nasional VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kertapati, Sidik. 1964. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta.
- Legge, J.D. 1972. *Soekarno : A Political Biography*. London.

- Malik, Adam, 1982. *Mengabdikan Republik, Adam dari Andalas, I*. Jakarta: Gunung Agung.
- Martosewojo, Soejono, 1984. *Mahasiswa 45 Prapatan 10: Pengabdianannya*. Bandung: Patma.
- Nishijima, Shigetada et al, 1963. *Study of the Japanese Military administration in Indonesia Joint Publication Research Service*.
- Notosusanto, Nugroho, 1968. *Pemberontakan Tentara PETA Blitar Melawan Djepang*. Djakarta: Lembaga Sedjarah Hankam.
- Pringgodigdo, A.G. 1952. *Tata Negara di Djawa pada waktu Pendudukan Djepang*. Yogyakarta.
- _____, 1977. *Perjuangan Bangsa Indonesia Menegakkan Pancasila Dalam Masa Pendudukan Jepang*. Dalam Santiaji Pancasila Malang.
- Pringgodigdo, A.K. 1967. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Priyadi, Arief, 1986. *Wawancara dengan Sayuti Melik*. Jakarta : CSIS
- Raliby, Osman. 1952. *Sejarah Hari Pahlawan*. Djakarta.
- Safwan, Mardanas, 1983/1984. *Prof Mr. Iwa Kusumasumantri SH, Hasil Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Ditjarahnitra, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soediro, 1972. *Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945*. Jakarta : Idayu.
- Subagyo, Wisnu, 1986. *Dr. Mohammad Amir, Hasil Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Ditjarahnitra Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sugito, A.T. 1985/1986. *DR. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Hasil Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta : Ditjarahanitra, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sumarno, et al. 1974. *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah.

Tim Fakultas Sastra UNPAD, 1978 -1979. *Sejarah Radio Indonesia*. Bandung: Proyek Penelitian dan Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan Republik Indonesia.

Tjokroaminoto, Harsono, 1983. *Menelusuri Jejak Ayahku*. Jakarta : Arsip Nasional.

Umar, Rika, 1986. *Mr. I Gusti Ketut Pudja, Riwayat Hidup dan Pengabdianya*. Jakarta: Ditjarahnitra, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Weerd, K.A. 1946. *The Japanese Occupation Of Netherlands Indies*.

Wertheim, WF, 1959. *Indonesian Society in Transition*. S Gravenha Go: W van Hoeve

C. MAJALAH DAN BERITA PEMERINTAH

Djawa Baroe, Djawa Shinbunkai (1943-1945, Jakarta.

Femina, 16 Agustus 1979, "*Mengenang 17 agustus 1945*, Wanita Penyebar Proklamasi.

Kan Po(Berita Pemerintah), 1942-1945), Jakarta. Pandji Poestaka (1943-1945), Jakarta.

Pertiwi, 10 Agustus 1987, *Pukul Berapa NaskahProklamasi ditandatangani*.

Soeara MIAI (1942-1943), Jakarta. Soeara Moeslim (1942-1943), Jakarta.

Selecta, 27 Desember 1971, *Prof H. Iwa Kusumasumantri SH (1969-1971)*.

D. SURAT KABAR

Abadi, 20 Agustus 1955. *Beberapa kekeliruan sekitar proklamasi 17 Agustus 1945*. Nawani Dusky.

Asia Raja (1942-1945), Jakarta.

- Berita Buana, 21-23 Agustus 1979, *Kesaksian Saya disekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia*. Sayuti Melik.
- Berita Yudha, 18 Agustus 1987, *Rengasdengklok Menjelang Detik-detik Proklamasi*.
- Buana Minggu, 2 September 1984, *Semalam suntuk mempersiapkan Teks Proklamasi, Shigetada Nishijima Mencari Bung Karno yang sedang di culik*.
- Jayakarta, 18 Agustus 1987, *Nalenan dan Taufik tentang Teks proklamasi, kemerdekaan Bukan Hadiah Jepang, Nishijima tidak terlibat*.
- Kompas, 16 Agustus 1969, *Saat-saat penentuan Proklamasi, Maeda*.
- _____, 16 Agustus 1975, *Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945*.
- _____, 16 Agustus 1978, *Menjelang Proklamasi menurut Bung Hatta*.
- Merdeka, 14 Agustus 1975, *Proklamasi Kemerdekaan Hasrat Semua, BM. Diah*.
- _____, 11 Maret 1978, *Detik-detik Terpenting Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Ahmad Subardjo*.
- _____, 15 Agustus 1979, *Jakarta 17 Agustus 1945, Suryanto*.
- Pos Kota, 18 Agustus 1948, *Wanita Jepang bikin nasi goreng untuk sahur Proklamasi RI*.
- Sinar Harapan, 17 September 1977, *In Memoriam Laksamana Maeda, Indonesia Kehilangan seorang setia kawan yang menentukan, Ahmad Subardjo*.
- Suara Pembaharuan, 18 Agustus 1987, *Siapa Menemui Bung Hatta: Perwira Jepang atau para Mahasiswa*.
- Suara Karya, 18 Agustus 1975, *Menelusuri langkah-langkah kemerdekaan, Sayuti Melik*.
- Tjahaya (1942-1945), Bandung.

Terbit, 6 agustus 1985, *Merah Putih Berkibar Sejak 16-08-45 di Rengasdengklok, dipasang dipuncak pohon kelapa.*

_____, 27 Agustus 1987, *Nishijima : Lulusan Sekolah Kemerdekaan, Pegang Peranan Penting.*

_____, 28 Agustus 1987, *Kemerdekaan bukan hadiah Jepang tetapi usaha sendiri.*

_____, 31 Agustus 1987, *Seorang Santri ikut Mendesak Bung Karno.*

_____, 1 September 1987, *Bung Hatta tak Mengakui Kehadiran Nishijima.*

D. KASET

Arsip Nasional, *Wawancara dengan AA Hamidhan.*

_____, *Wawancara dengan Drs. Moh. Hatta.*

_____, *Wawancara dengan Teukoe Mohammad Hasan.*

Museum Perumusan Naskah Proklamasi, *Pidato BM. Diah.*

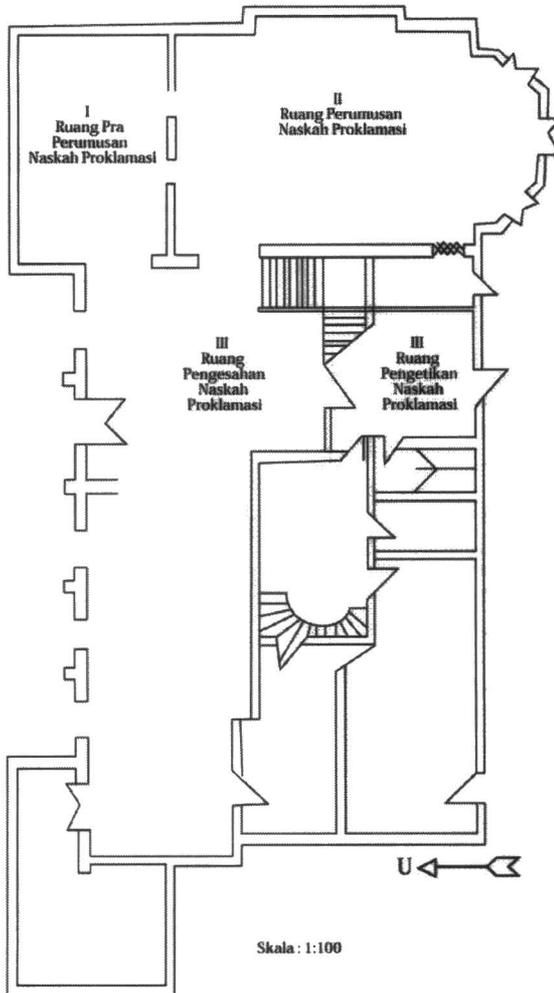
_____, *Pidato Sayuti Melik.*

_____, *Wawancara dengan Satzuki Mishima.*

E. WAWANCARA

BM. Diah (73 tahun), *Tokoh yang menghadiri Peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi.*

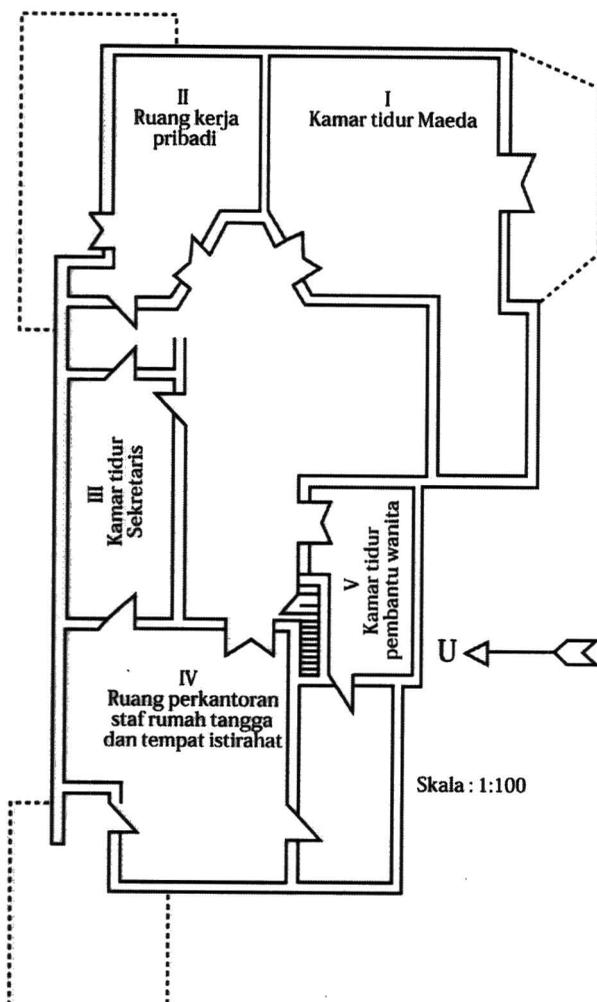
DENAH RUANG LANTAI BAWAH



Keterangan :

- I. Digunakan Maeda, sebagai kantor dan ruang tamu khusus.
- II. Ruang makan dan tempat rapat.
- III. Bagian dari dapur yang dihubungkan ke Ruang II dengan pintu kaca yang sekarang ditutup tembok baru.
- IV. Ruang rapat dan ruang tamu yang berjumlah banyak.

DENAH RUANG LANTAI ATAS



Keterangan :

Ruangan di lantai atas, dipersiapkan untuk pameran kontemporer

PETA LOKASI MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

